

**PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPOLISIAN MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN SEMENTARA TERHADAP KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI DI UPPA KEPOLISIAN RESORT MALANG KOTA)  
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam ilmu hukum

Oleh :

**Nama: Harwin Wanandi**

**NIM: 135010118113019**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPOLISIAN  
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SEMENTARA  
TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA (STUDI DI UPPA KEPOLISIAN  
RESORT MALANG KOTA)**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : Harwin Wanandi**

**b. NIM : 135010118113019**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Jangka waktu penulisan : 5 bulan**

**Disetujui pada tanggal :**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**

Dr. Lucky Endrawati, S.H.M.H

Mufatikhatul Farikhah S.H, MH.

NIP. 195703161998022001

NIP. 198408162015042002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr.Yuliati SH.,LL.M

NIP. 196607101992032003

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPOLISIAN MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN SEMENTARA TERHADAP KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI UPPA KEPOLISIAN RESORT  
MALANG KOTA)**

**Oleh:**

**Harwin Wanandi**

**135010118113019**

Skripsi ini disahkan oleh majelis penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H.

Mufatikhatul Farikhah S.H, MH.

NIP. 195703161998022001

NIP. 198408162015042002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Dr.Yuliati SH.,LL.M

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.

NIP. 196607101992032003

NIP. 196208051988021001



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Rahmad Syafaat, SH.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Dr. Yuliati SH.,LL.M ,selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Dr. Lucky Endrawati, S.H.M.H , selaku dosen pembimbing pertama yang telah menyisihkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Mufatikhatul Farikhah S.H, MH , selaku dosen pembimbing kedua yang telah menyisihkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-Dosen Konsentrasi Hukum Pidana, selaku dosen yang memberikan ilmu, arahan di setiap mata kuliah konsentrasi Pidana.
6. Ibu Suhartaik, selaku orangtua penulis serta Wiska Prihaningrum, Weni Puspita Sari, selaku kakak kandung penulis yang tidak lelah selalu memberikan motivasi

dan doa kepada penulis, Semoga selalu diberikan kelancaran segalanya oleh Allah SWT.

7. Kepada sahabat sekaligus saudara seperjuangan KONTRAKAN JAHAT Kenan, Jorda, Ojik, Dino, Fajar, Akbar, Brian dan Deni yang telah memberikan banyak pelajaran hidup kepada penulis.
8. Kepada teman-teman Seperjuangan Burhan, Jupentus, Wisnu, Erwin dan yang lain yang belum tersebut yang telah berjuang bersama dalam penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap dengan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kalangan akademis lainnya.

Malang, 16 Mei 2018

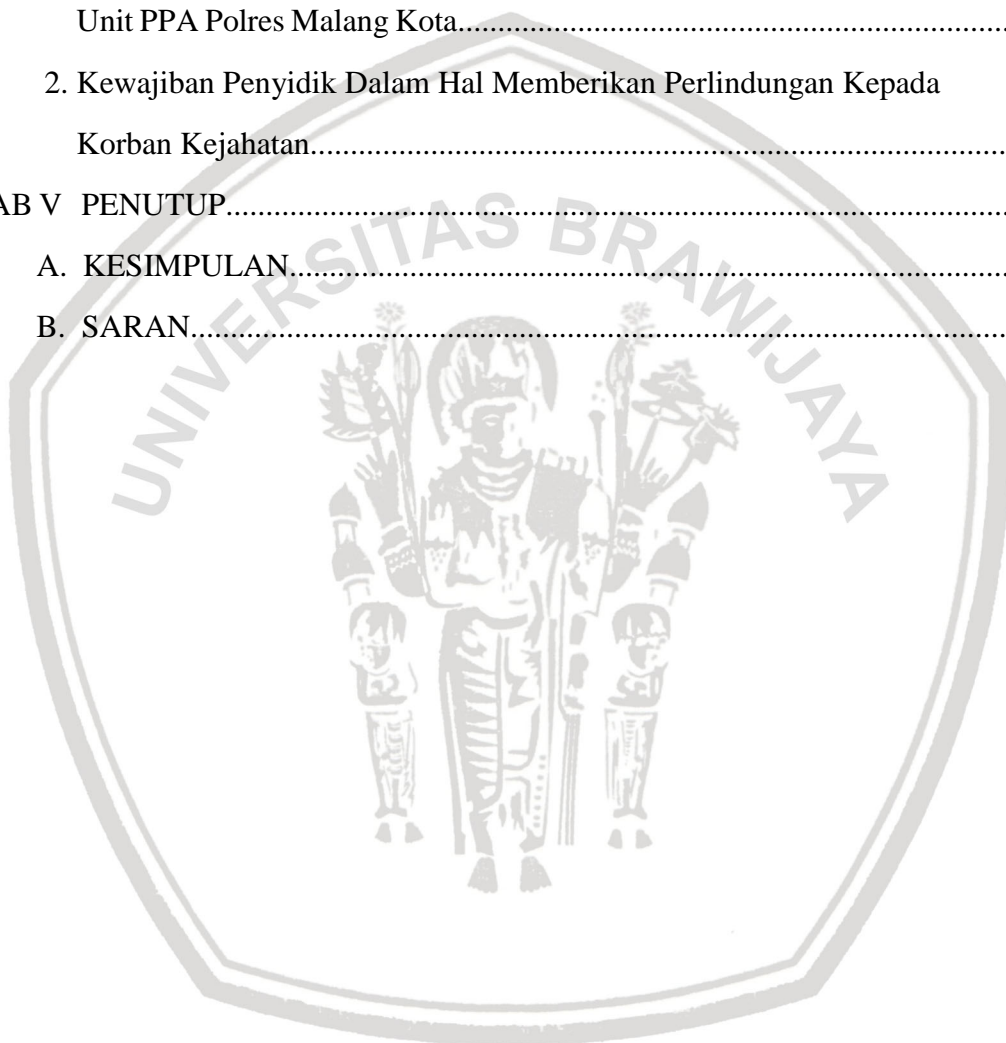
Penulis

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKAN.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Umum Perlindungan Hukum.....	13
B. Kajian Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	17
C. Kajian Umum Korban KDRT.....	21
D. Kajian Umum Tentang Tugas Kepolisian Republik Indonesia.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi penelitian.....	32
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Populasi, Sample dan Teknik sampling.....	35
G. Teknik Analisa Data.....	37
H. Definisi Operasional.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Gambaran Umum Resort Malang Kota.....	39
2. Gambaran Umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kota Malang dan Sejarah Di Bentuknya.....	53
B. Dasar-dasar pertimbangan penyidik memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT.....	61



1. Mekanisme pemberian perlindungan pihak kepolisian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.....	61
2. Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga untuk di berikan perlindungan.....	68
C. Kriteria yang harus di penuhi penyidik agar korban di berikan perlindungan sementara.....	81
1. Deskripsi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh penyidik Unit PPA Polres Malang Kota.....	81
2. Kewajiban Penyidik Dalam Hal Memberikan Perlindungan Kepada Korban Kejahatan.....	88
BAB V PENUTUP.....	94
A. KESIMPULAN.....	94
B. SARAN.....	94





## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kasus KDRT Kepolisian Resort Malang Kota.....	6
Tabel 2 Orisinalitas Penelitian.....	8
Tabel 3 Data Korban Penerima Perlindungan di Unit PPA Polres Malang Kota.....	85



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Malang Kota.....	50
Bagan 2 Struktur Organisasi Unit PPA Polres Malang Kota.....	59
Bagan 3 Alur Pemberian Perlindungan Kepada Korban.....	67
Bagan 4 Penanganan Awal Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	83
Bagan 5 Penanganan Lanjutan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	84



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
Lampiran 2	Surat Keterangan Dosen Pembimbing Sekripsi
Lampiran 3	Kartu Bimbingan Sekripsi
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



## RINGKASAN

Harwin Wanandi, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2018, **PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPOLISIAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SEMENTARA TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI UPPA KEPOLISIAN RESORT MALANG KOTA)** Dr.Lucky Endrawati, SH.MH, Mufatikhatul Farikhah, SH.MH

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pemenuhan Kewajiban Kepolisian Memberikan Perlindungan Sementara Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pilihan tema tersebut di latar belakang dari belum maksimalnya penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh pihak kepolisian, korban kekerasan dalam rumah tangga sudah selaknya mendapatkan perlindungan untuk mencegah rasa takut dan tindakan kekerasan yang terulang, dalam pemberian perlindungan Kepolisian wajib memberikan perlindungan yang telah di atur di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan sementara sangat penting di berikan kepada korban korban kekerasan dalam rumah tangga karena merupakan upaya pertama untuk mencegah terjadinya pengulangan kekerasan kepada korban.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa alasan atau dasar-dasar pertimbangan penyidik memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana di atur dalam UU PKDRT ? (2) Apa kriteria yang harus di penuhi penyidik agar korban di berikan perlindungan sementara ?

Kemudian penulis karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis empiris dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Data hukum primer, dan skunder yang di peroleh penulis akan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pemberian perlindungan sementara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Malang Kota belum berjalan sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam pemberian perlindungan sementara Kepolisian Resort Malang Kota memiliki kriteria yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga harus mengalami 2 (Dua) kali kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini tidak sesuai dengan apa yang tertuang di dalam pasal 16 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga keamanan korban belum sepenuhnya terpenuhi.

## SUMMARY

Harwin Wanandi, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, May 2018, FULFILLMENT OF POLICE POLICING PROVIDES TEMPORARY PROTECTION ON VULNERABILITY VIOLENCE IN HOUSEHOLD (STUDY IN POLICE RESORT UPPA MALANG KOTA) Dr.Lucky Endrawati, SH.MH, Mufatikhatul Farikhah, SH.MH

In this thesis, the authors raised the issue of Police Duty Fulfillment Providing Temporary Protection Against Victims of Domestic Violence. The choice of the theme in the background from the not yet maximal implementation of the Law on the Elimination of Domestic Violence by the police, victims of domestic violence have selaknya get protection to prevent fear and repeated acts of violence, in the provision of protection Police must provide protection that has been regulated in the Law on the Elimination of Domestic Violence, temporary shelter is very important to be given to victims of domestic violence as it is the first attempt to prevent the repetition of violence against the victim.

Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) What are the reasons or grounds for consideration of the investigator to provide temporary protection to victims of domestic violence as stipulated in UU PKDRT? (2) What are the criteria that the investigator must meet in order to provide the victims with temporary protection?

Then the author of this scientific paper the author uses the method of Juridical empirical research with the approach method of Sociological Juridical. Primary legal data, and the secondary obtained by the authors will be analyzed by using qualitative descriptive method of research procedures that produce descriptive data, which comes from writing or expression and behavior that can be observed from huma From the results of research with the above method, the authors obtained answers to the existing problems that provision of temporary protection against victims of domestic violence in the Police Resort Malang City has not run in accordance with article 16 Law Abolition of Domestic Violence, in provision of temporary protection Police Resort Malang City has the criteria that victims of domestic violence must experience 2 (two) cases of domestic violence, this is not in accordance with what is contained in article 16 of the Law on the Elimination of Domestic Violence, so that the victim's security has not been fully fulfilled.ns.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945(yang selanjutnya disebut UUD 1945). Konsekuensi dari negara hukum adalah adanya pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM) dari setiap warga negara dan wajib dilindungi oleh negara sebagai hak-hak dasar dari manusia. Penjaminan , pengakuan, perlindungan dan perlakuan yang sama didepan hukum juga tertuang dalam pasal 28 UUD 1945. Penjaminan yang diberlakukan terhadap setiap warga negara Indonesia bertujuan untuk memberikan rasa aman dari ancaman atau tindakan yang yang menimbulkan kerugian bagi warga negara. Negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum kepada setiap warga negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya hukum merupakan wujud dan cerminan dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:<sup>2</sup>

1. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara ;

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan**, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 11

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, **Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review**, UII yogyakarta ,2005,hlm 9.



3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Negara dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dilakukan oleh organ-organ negara. Pelaksanaan tersebut bertujuan untuk memastikan dan mengaktualisasikan peran negara dalam kehidupan masyarakat telah sesuai serta berjalan sesuai dengan amanat UUD 1945. Hak dalam hal ini merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap warga negara erat kaitannya dengan tindakan penyelewengan wewenang atau benturan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan bagi setiap warga negara sangat penting dan peran negara dalam mengatasi sengketa yang terjadi di masyarakat sangat dibutuhkan. Peran negara dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan.

Kepolisian merupakan lembaga negara yang memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan

---

<sup>3</sup> Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, London, 2003, hlm 7.



hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya di sebut UU POLRI).

Pihak kepolisian memiliki kewajiban dalam menangani perkara pada tingkat pertama, hal ini menunjukkan bahwa kepolisian menjaga kestabilan dalam masyarakat dan perlindungan dapat secara langsung diberikan kepada masyarakat. Pada saat ini tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Kepolisian memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Melihat ketentuan normatifnya, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disebut UU PKDRT) telah secara jelas mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pihak yang diberi kewajiban oleh UU PKDRT dalam menjalankan mekanisme perlindungan terhadap korban tidak hanya kepolisian, melainkan Pengadilan, advokat, relawan pendamping, pembimbing rohani dan tenaga kesehatan. Dari beberapa pihak tersebut, yang memiliki peran penting dalam menegakan hukum terutama melakukan penanganan pertama dari suatu peristiwa pidana

adalah kepolisian. Dapat dikatakan bahwa, pihak kepolisian merupakan pihak pertama yang memberikan penanganan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Begitu pentingnya peranan dari kepolisian tersebut, maka kepolisian harus secara tepat dan menjalankan ketentuan dalam UU PKDRT dengan benar.

“Jenis kekerasan dalam rumah tangga telah secara tegas di atur pada pasal 5 UU PKDRT yakni : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik.
- b. kekerasan psikis.
- c. kekerasan seksual; atau.
- d. penelantaran rumah tangga”.

Ketentuan yang mengatur Hak-Hak korban dari tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur dalam UU PKDRT dijelaskan bahwa:

#### Pasal 10

“Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.”

Berdasarkan pasal yang memuat tentang hak korban tersebut di harapkan korban KDRT mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis

berkepanjangan. Sesuai dengan konsiderans Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus memperoleh perlindungan dari kepolisian untuk memperoleh perlindungan sementara supaya korban terhindar dan terbebas dari kekerasan maupun ancaman kekerasan,penyiksaan,atau perlakuan yang merendahkan manusia.<sup>4</sup>

Korban KDRT ketika ingin mendapatkan perlindungan kepada kepolisian pertama-tama melapor ke Polres terdekat atau melapor ke kantor polisi dimana dekat dengan tempat tinggal korban, korban setelah sampai di kantor polisi melakukan laporan ke UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres tempat korban melapor. Dan korban juga dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan KDRT kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara berdasar pasal 26 UU PKDRT .

Korban juga bisa mengajukan secara lisan yang akan dicatat oleh panitera pengadilan Negeri. Perintah perlindungan ini dapat berlaku paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Selain itu korban juga perlu untuk mencatat kronologis kejadian, melakukan bukti visum atas luka yang timbul, menceritakan masalah yang dialaminya secara terbuka dan jujur kepada para pendamping, mempersiapkan mental dan fisik karena harus melewati proses hukum yang panjang serta kemungkinan terror/intimidasi dari pelaku terhadap korban atau keluarga.

Puluhan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di Kota Malang dalam kurun waktu 2015 sampai desember 2017. Fenomena

---

<sup>4</sup> Rena yulia,Viktimologi;Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,Graha Ilmu,2013,hlm 115

KDRT ini dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan adanya orang ketiga. Pada tahun 2015 terdapat 69 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi, pada tahun 2016 32 kasus dan di tahun 2017 bulan desember terdapat 36 kasus KDRT. Lebih dari 50% kasus yang terjadi antara tahun 2015-2017 adalah kekerasan fisik dan disebabkan karena tuntutan ekonomi yang tinggi serta perebutan hak asuh anak, berikut rincian tabel data kasus KDRT Kepolisian Resort Malang Kota.

**TABEL I**

**Kasus KDRT Kepolisian Resort Malang Kota**

Tahun	Bentuk kekerasan dalam rumah tangga				Jumlah
	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	
2015	46	11	-	12	69
2016	25	5	-	2	32
2017	33	2	-	1	36

(Sumber : Data sekunder, diolah, 2017)

Dari data tersebut dapat diketahui bahwasanya Kasus KDRT kerap terjadi dari tahun ke tahun antara 2015-2017 tidak selalu meningkat namun rata-rata yang terjadi pertahunnya 45 kasus, hal ini menunjukkan bahwasanya kepolisian harus memberikan perhatian lebih mengingat KDRT merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, dan berdasarkan latar belakang timbulnya kekerasan adalah salah satunya faktor ekonomi.

Jenis kekerasan yang paling mendominasi adalah jenis kekerasan fisik yakni sebesar 75% dari jumlah total keseluruhan kasus KDRT dalam kurun waktu tiga tahun, kemudian penelantaran rumah tangga sebesar 10%, dan kekerasan psikis sebesar 15% sedangkan 0% untuk kekerasan seksual. Melibatkan korban baik istri , anak maupun suami, perlindungan terhadap korban sangat di butuhkan untuk memberikan rasa aman kepada korban KDRT<sup>5</sup> . Perlindungan tersebut harus segera di berikan kepada korban , sebagaimana tercantum dalam pasal 16 UU PKDRT mengenai pemberian perlindungan sementara kepada korban KDRT.

Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki tema besar yang sama dengan penelitian ini yakni mengenai perlindungan korban KDRT namun tentu terdapat perbedaan substansi yang dikaji. Dalam penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang mengangkat mengenai pemberian perlindungan sementara terhadap korban. Berikut ini adalah tabel penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini adalah sebagai berikut.

---

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Bripda Lidyawati Anggota UPPA Polres Malang Kota pada tanggal 17 Desember 2017



**TABEL II**

**Orisinalitas Penelitian**

No	Tahun peneliti an	Nama peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2013	BIDARI CHRISTY TARAKANITA  FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Perlindungan Hukum Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi di badan Perberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Kota Yogyakarta)	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang di lakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat kota Yogyakarta ?  2. Bagaimana konsep Perlindungan Hukum yang di lakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta dalam penanganan kasus korban KDRT ?	Pada penelitian tahun 2013 ini mengkaji mengenai bentuk dan konsep perlindungan hukum korban KDRT yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta, Sedangkan yang di kaji penulis kali ini tentang pemberian perlindungan sementara oleh pihak kepolisian terhadap korban.
2.	2014	DEDI RISFANDI  FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR	Perlindungan Hukum terhadap Perempuan korban kekerasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota makasar	1. Apakah upaya- upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga?  2. Apakah kendala penegakan hukum dalam mengimplementasik an perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga?	Pada penelitian tahun 2014 ini mengkaji tentang bentuk upaya hukum terhadap perempuan korban kekerasan tindak pidana kekersan dalam rumah tangga di kota makasar, Sedangkan yang di kaji penulis kali ini tentang pemberian perlindungan sementara oleh pihak kepolisian terhadap korban.

(Sumber : Data sekunder,diolah 2018)

Berdasarkan permasalahan mengenai pemberian perlindungan sementara korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini di khususkan pada perlindungan sementara yang semestinya di berikan oleh aparat kepolisian kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, maka berdasarkan penjelasan di atas penulis mengambil judul “Pemenuhan Kewajiban kepolisian Memberikan Perlindungan Sementara Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Kepolisian Resort Kota Malang)”.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa alasan atau dasar-dasar pertimbangan penyidik memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana di atur dalam UU PKDRT ?
2. Apa kriteria yang harus di penuhi oleh penyidik agar korban di berikan perlindungan sementara ?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan pelaksanaan pemberian perlindungan sementara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terkait perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian
2. Untuk mengetahui kriteria yang harus di penuhi oleh penyidik agar korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diberikan perlindungan sementara oleh aparat kepolisian.



#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat teoritis:

- a) Bagi penulis: Sebagai informasi tentang mengatasi masalah dalam suatu Undang-Undang khusus nya UU PKDRT.
- b) Bagi akademisi hukum: Sebagai pengembangan ilmu sekaligus dapat dijadikan acuan dalam penegakan suatu Undang-undang

2. Manfaat Praktis:

- a) Bagi pembuat kebijakan sebagai rekomendasi dan evaluasi bagi pembentukan undang-undnag dalam hal membuat kebijakan agar lebih adil dan terperinci yang berkaitan dengan korban KDRT.
- b) Bagi Penegak hukum khususnya kepolisian sebagai bahan rekomendasi untuk melaksanakan pemberian perlindungan sementara terhadap korban KDRT, agar dalam pelaksanaanya dapat sesuai dengan apa yang telah di atur dalam Undang-undang.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistemika penulisan hukum di buat agar memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan dari isi penulisan serta ruang lingkupnya, yang mana berpedoman pada penulisan hukum baku. Sistematika hukum ini akan meliputi lima bab yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan yang terakhir adalah penutup, di tambah dengan lampiran dan daftar pustaka. Setiap bab dibagi menjadi

beberapa sub-bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun penelitian hukum disusun dengan sistematika adalah berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang permasalahan yang di teliti, yakni pemenuhan kewajiban kepolisian memberikan perlindungan sementara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga bertempat di Kepolisian Resort Malang Kota. Bab pendahuluan berisi beberapa sub bab di antaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang kajian mengenai perlindungan hukum, kajian tentang korban, kajian tentang KDRT dan kajian tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yang dalam setiap sub-bab tersebut menjelaskan penjabaran mengenai substansi-substansi penting yang nantinya dapat menjadi landasan dalam menjawab permasalahan yang di ambil dalam penelitian ini.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

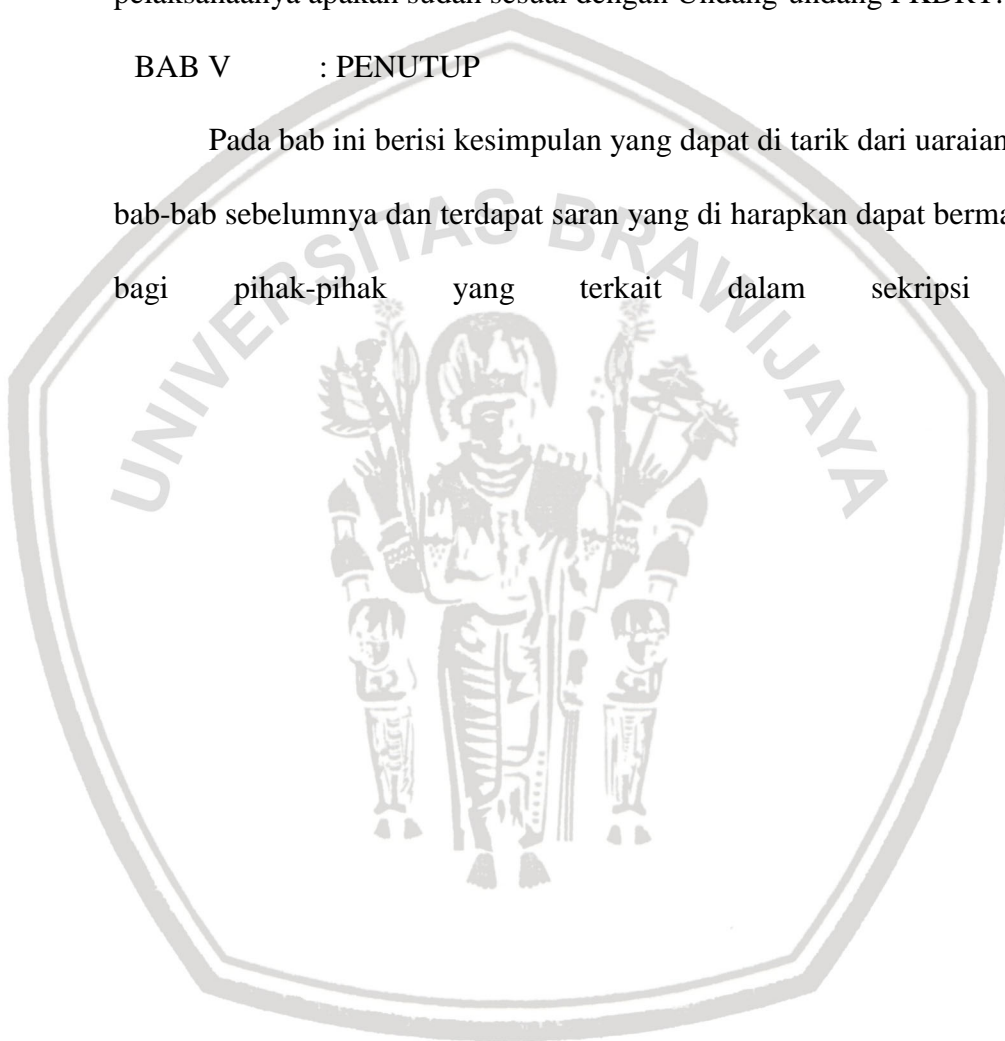
Pada bab ini berisi jenis penelitian yang di gunakan, metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum serta definisi operasional.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian tentang penanganan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga bertempat di Kepolisian Resort Malang Kota, yaitu bagaimana kewajiban kepolisian memberikan perlindungan sementara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan dalam pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan Undang-undang PKDRT.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan yang dapat di tarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya dan terdapat saran yang di harapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam sekripsi ini.







## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Perlindungan Hukum

##### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berdasarkan kamus besar bahasa indonesia adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berikut : Suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang PKDRT merupakan segala upaya yang diberikan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau

---

<sup>1</sup> Depdikbud, 1989, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Buku Satu, Balai Pustaka Utama, Jakarta, hlm.874

<sup>2</sup> Soedikno Mertokusumo, 1991, **Mengenal hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, hlm.9



aparatus keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut C. Maya Indah mengemukakan bahwa perlindungan korban meliputi dua hal, yaitu<sup>3</sup> ;

1. Perlindungan korban tidak secara langsung yaitu : perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Bentuk perlindungan korban secara tidak langsung dalam kebijakan kriminal yaitu untuk memperoleh hak hidup, keamanan dan kesejahteraan.
2. Perlindungan korban secara langsung yaitu : untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*.

Salah satu perlindungan hukum yang diatur di dalam UU PKDRT adalah perlindungan sementara yang diatur di dalam pasal 16, yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

---

<sup>3</sup> C. Maya Indah, **Perlindungan korban; suatu perspektif Viktimologi dan Kriminologied**, Kencana, Jakarta, 2014 hlm. 125



(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama<sup>7</sup> (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”.

Dalam pasal 17 menyebutkan bahwa : “Dalam memberikan perlindungan sementara , kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban” untuk memberikan perlindungan khususnya korban KDRT yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak, penanganan yang khusus di perlukan untuk menangani permasalahan tersebut, di dalam setruktur organisasi kepolisian sudah terbentuk Unit PPA yang bertugas khusus menangani korban perempuan dan anak adapun beberapa contoh kasus yang di tanangani seperti, pemerkosaan, penganiayaan dalam rumah tangga, pelecehan seksual.<sup>4</sup>

Seiring perkembangan masalah KDRT yang kian meningkat dan menjadi permasalahan hampir di setiap negara, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memberikan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT telah mendapat perhatian secara nasional dan internasional. Menurut Pasal 2 deklarasi PBB, dijelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau

---

<sup>4</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita**, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2008, hlm. 141

psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>5</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Terkait perlindungan hukum, terdapat beberapa teori, yaitu<sup>6</sup>:

### 1. Teori Utilitas

Teori ini mengacu pada kemanfaatan yang besar terhadap jumlah yang besar, pemberian perlindungan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang besar dibandingkan tidak diterapkannya pemberian perlindungan tersebut.

### 2. Teori Tanggungjawab

Teori ini menjelaskan bahwa subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya. Dengan kata lain, siapa yang berbuat maka ia yang bertanggungjawab, kecuali terdapat alasan yang membebaskannya.

---

<sup>5</sup> Emilda Firdaus, **Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 40

<sup>6</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit*, hlm. 163

## **B. Kajian Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Rumah Tangga dan Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Keluarga adalah lingkungan sosial terkecil dan pertama yang diketahui oleh manusia. Manusia dalam keluarga dapat belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, interaksi tersebut bertujuan untuk membentuk kepribadian dan karakter dari setiap anggota keluarga. Pada umumnya, keluarga merupakan wadah bagi setiap anggota keluarga untuk mengembangkan potensi diri, namun hal ini sering kali disimpangi oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga satu kepada anggota keluarga yang lain. Sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan. Pengertian keluarga tercantum dalam Pasal 1 ke 30 KUHAP, yang berbunyi:

“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”.

Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak, namun seringkali dalam keluarga juga ada sanak saudara seperti orang tua dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak dan keluarga lain yang memiliki hubungan darah. Tidak hanya saudara, asisten rumah tangga juga seringkali tinggal bersama-sama dalam sebuah keluarga, hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti jarak yang jauh dan keterbatasan waktu untuk pulang ke rumahnya sendiri. Seperti yang diatur pasal 2 UU PKDRT, yang berbunyi:

- (1) “lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
  - a. suami, isteri dan anak;
  - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluargadengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut
- (2) orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”.

Rumusan pasal diatas menunjukkan bahwa subyek KDRT hanya anggota keluarga dan asisten rumah tangga yang berada dalam satu tempat tinggal.

## 2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kamus Besar Bahasa Indonesia memeberi definisi kekerasan yaitu perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain serta paksaan. Kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik.<sup>7</sup> Kata kekerasan berasal dari bahasa latin yaitu *violentia*, artinya kekerasan; keganasan; kehebatan; kesengitan; kebengisan; kedahsyatan; kegarangan; aniaya; perkosa. Penggunaan kata kekerasan sendiri digunakan untuk mendeskripsikan sebuah perilaku dari seseorang, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup

---

<sup>7</sup> Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan**, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, Hal.14

(*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.<sup>8</sup>

Kekerasan dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan kolektif dan kekerasan individual. Kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan orang dan kumpulan orang banyak, sedangkan kekerasan individual dilakukan oleh individu atau perorangan. Aktivitas kekerasan individual susah diidentifikasi, karena mereka yang melakukannya cenderung lebih termotivasi untuk tidak mengungkapkan aktivitas kekerasan yang dilakukannya dan korban kekerasan juga memilih untuk menutup diri serta tidak mau melaporkan kekerasan yang telah dideritanya. Kekerasan individual sering terjadi dalam lingkup privat yang membuat sulit untuk diketahui. Kekerasan individual sering berkaitan dengan kekerasan fisik maupun nonfisik seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, penganiayaan, pengancaman dan penelantaran.

“Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 1 angka 1 UU PKDRT, yang berbunyi:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

---

<sup>8</sup> Thomas Santoso (Ed), **Teori-Teori Kekerasan**, Galia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 11



Berdasarkan pengaturan Undang-Undang PKDRT, KDRT memiliki beberapa macam bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT tersebut tertuang dalam pasal 5 UU PKDRT yang berbunyi:”

- a. “Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri dan penderitaan psikis.
- c. Kekerasan seksual adalah perbuatan untuk memaksa hubungan seksual untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja, juga tidak memberikan penghidupan kepada keluarga.”



## C. Kajian Umum Korban KDRT

### 1. Pengertian Korban

Dikaji menurut sudut pandang ilmu hukum pidana umumnya korban termasuk dalam terminologi disiplin ilmu viktimologi dan dikembangkan dalam sistem peradilan pidana. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti secara sempit dan luas. Pengertian korban secara luas dapat diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan oleh akibat pelanggaran hukum pidana maupun di luar hukum pidana. Untuk pengertian korban secara sempit dapat diartikan sebagai korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.<sup>9</sup> Pembahasan mengenai korban sangat penting, namun seringkali diabaikan. Korban juga memiliki peranan dalam terjadinya suatu kejahatan sehingga dapat diartikan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan jika tidak ada korban. Menurut pendapat beberapa para ahli hukum pidana, korban memiliki banyak definisi sebagai berikut:

#### 1. Arif Gosita

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 2

<sup>10</sup> Moerti Hadiati Soeroso, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 112



## 2. Muladi

Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>11</sup>

## 3. Soedarto

Korban bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung yaitu istri kehilangan suami, anak kehilangan bapak dan lainnya.<sup>12</sup>

Di samping pendapat para ahli di atas, definisi korban juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional, yaitu:

### 1. Undang-Undang PKDRT

Pengertian korban KDRT telah secara jelas tercantum dalam pasal 1 angka 3, yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

<sup>11</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.cit, hlm. 46

<sup>12</sup> H. Siswanto Sunarso, **Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 243

## 2. Undang-Undang LPSK

Pengaturan terkait pengertian korban, diatur dalam pasal 1 angka 2, yang berbunyi “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

## 3. Deklarasi PBB dalam *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* 1985.

Korban adalah orang baik secara individu maupun kolektif yang telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi dan social atau hak-hak dasar disebabkan oleh karena pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan.<sup>13</sup>

### 2. Jenis – Jenis Korban

Korban tidak selalu individu atau perseorangan, namun juga dapat berupa kelompok orang, masyarakat dan badan hukum. Korban dapat diklasifikasikan sebagai berikut<sup>14</sup> :

#### a. *Unrelated victims*

Korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.

#### b. *Provocative victims*

Seseorang yang secara aktif mendorong dirinya sebagai korban.

#### c. *Participating victims*

Seseorang yang tidak melakukan perbuatan apapun akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

#### d. *Biologically weak victims*

<sup>13</sup> Moerti Hadiati Soeroso, Op.cit, hlm. 113

<sup>14</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Op.cit, hlm. 50

Mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.

e. *Socially weak victims*

Mereka yang memiliki social yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

f. *Self victimizing victims*

Mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Menurut Stephen Schafer, berdasarkan peranan korban dalam kejahatan, korban dapat diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yaitu:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun, namun dapat menjadi korban dan kesalahan terdapa pada pelaku;
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Korban turut memiliki peran dalam terjadinya kejahtan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban;
- c. Mereka yang secara biologis dan social potensial menjadi korban;
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku.<sup>15</sup>

### 3. Hak – Hak Korban

Sebagai warga negara korban juga mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan, artinya bisa di terima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 51

kondisi yang mempengaruhi korban baik sifatnya internal maupun eksternal.<sup>16</sup> Secara umum hak korban dapat disebutkan sebagai berikut<sup>17</sup>:

- e. Korban berhak mendapatkan kompensasi dari pelaku sesuai dengan kemampuan pelaku;
- f. Apabila korban tidak membutuhkan kompensasi maka ia berhak menolak;
- g. Apabila korban meninggal dunia karena tindakan pelaku, ahli waris korban berhak mendapatkan kompensasi;
- h. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- i. Mendapatkan kembali hak miliknya;
- j. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila akan membahayakan dirinya;
- k. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
- l. Korban berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum;
- m. Korban berhak mempergunakan upaya hukum;

Korban kejahatan pada dasarnya adalah pihak yang menderita dari adanya tindak pidana, maka dari itu ketentuan dalam rangka perlindungan terhadap korban harus jelas, khususnya pada rumusan-rumusan tentang hak-hak dari korban. Hak-hak dari korban wajib dipenuhi dan dilindungi oleh penegak hukum, pengaturan terkait hak-hak korban telah banyak tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm 52.

<sup>17</sup> Moerti Hadiati Soeroso, Op.cit, hlm. 115

sendiri, terdapat pengaturannya yang ada dalam rumusan KUHAP.

Menurut KUHAP, hak-hak korban meliputi<sup>18</sup> :

1. Hak untuk menuntut penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana (pasal 98-101 KUHAP)
2. Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat 1 KUHAP)
3. Hak pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1 KUHAP)
4. Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP)
5. Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat 1 KUHAP)
6. Hak untuk didampingi penerjemah (Pasal 178 ayat 1 KUHAP)
7. Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1 KUHAP)

Hak-hak korban kejahatan juga tertuang dalam undang-undang diluar KUHAP, yaitu Undang-Undang LPSK. Hak korban kejahatan diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang LPSK, yang berbunyi:

“(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara”

<sup>18</sup> C. Maya Indah S, **Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi**, KENCANA, Jakarta, 2014, hlm. 143



- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan”.

Rumusan pasal diatas menunjukkan bahwa seorang korban pada umumnya memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum. Terkait hak-hak korban KDRT, sudah secara jelas diatur dalam pasal 10 UU PKDRT, yang berbunyi:

“Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani”.



#### D. Kajian Umum Tentang Tugas Kepolisian Republik Indonesia

Masyarakat selalu menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

Berdasarkan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Perubahan kedua, ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan TAP MPR No.VII/MPR/2000, keamanan di rumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melankan tugas-tugas pokok.

Di dalam pasal 4 UU POLRI Nomor 2 tahun 2002 di sebutkan bahwa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Dalam menjalankan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam pasal 13 UU POLRI Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut :

---

<sup>19</sup>H. Pudi Rahardi, **Hukum Kepolisian (profesionalisme dan reformasi)**, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007, hlm 1.

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Untuk lebih jelas mengenai tugas pokok sebagai mana yang di atur dalam pasal 13 tersebut , dalam pasal 14 ayat (1) UU POLRI Nomor 2 Tahun 2002 di sebutkan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta l.

melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sejalan dengan pasal 15 tersebut , dalam pasal 16 UU POLRI Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, di atur dalam pasal 16 ayat (1) sebagai berikut :

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi yang berjudul Pemenuhan kewajiban kepolisian memberikan perlindungan sementara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (studi di resort malang kota) merupakan penelitian yuridis Empiris. Jenis penelitian empiris digunakan karena dalam permasalahan penulisan skripsi ini penulis mengkaji pelaksanaan dari rumusan undang-undang dan bertujuan untuk mengamati kendala dan upaya dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut.

##### B. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan suatu pendekatan yaitu yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan tersebut dalam masyarakat yang bertujuan untuk menemukan fakta dan kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu penyelesaian masalah.<sup>1</sup>

Yuridis dalam hal ini adalah tugas dari Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Studi Di UPPA Kepolisian Resort Kota Malang). terkait Hak-Hak Korban KDRT yang diperoleh dari pihak Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak. Dalam kasus KDRT pihak korban

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 38



dalam mengajukan atau meminta perlindungan hukum kepada kepolisian untuk mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak KDRT harus mendapatkan hak-haknya yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 10 Huruf (a) Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004.

Sosiologis dalam hal ini karena penulis ingin mengetahui secara langsung keadaan di lapangan terkait hak-hak yang didapatkan oleh korban KDRT yang telah melapor kepada Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak, serta untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak dalam memberikan perlindungan sementara terhadap korban KDRT sehingga hak-hak korban KDRT dapat terpenuhi.

### **C. Lokasi penelitian**

Lokasi yang ditetapkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Malang Kota. Adapun penelitian ini memilih lokasi tersebut berdasarkan :

1. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Kota Malang. Terdapat 137 kasus KDRT yang ditangani Polres Kota Malang terhitung mulai tahun 2015 sampai bulan desember 2017. <sup>2</sup>
2. Belum maksimalnya pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>2</sup> Data survey pada 17 Desember 2017 di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit UPPA) Kepolisian Resort Malang Kota



3. Kepolisian berkewajiban memberikan dan memenuhi hak-hak korban sebagaimana rumusan pasal 16 UU PKDRT.
4. Terdapat banyaknya kasus KDRT fisik yakni rata-rata tiap tahunnya lebih dari 70% dari jenis KDRT lainnya.
5. Belum tersedianya rumah aman di kepolisian resort malang kota sebagai perlindungan pertama korban KDRT.

#### **D. Jenis Data dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

##### **a) Data Primer**

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah informasi yang berupa pemahaman, persepsi, sikap, tindakan, pengalaman dari subyek penelitian ini yaitu Kepolisian Resort Malang Kota. Selain itu data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber yaitu Kepala dan 2 (dua) anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Malang, serta data statistik kasus KDRT yang ditangani oleh Kepolisian Resor Malang Kota.

##### **b) Data Sekunder**

Data sekunder (*Secondary Data*) adalah informasi yang berasal dari studi kepustakaan (*Library Research*) berupa arsip, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan, jurnal, literatur dan peraturan perundang-undangan serta media elektronik.

Data sekunder (*secondary data*) diperoleh dari bahan kepustakaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya maupun literatur dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

## 2. Sumber Data

### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini meliputi hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari wawancara Kepala dan 2 (dua) anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Malang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi dari permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan terhadap korban KDRT.

### b) Sumber Data Sekunder

1. Peraturan perundang-undangan, diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Literatur yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Teknik Pengumpulan Data Primer**

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber atau responden, yang menggunakan daftar pertanyaan, baik yang sifatnya terbuka maupun tertutup. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber atau responden, yaitu Kepala Unit PPA dan 2 (dua) anggota Unit PPA Kepolisian Resor Kabupaten Malang serta 1 (satu) korban kekerasan dalam rumah tangga.

### **2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder**

Diperoleh melalui penelusuran pustaka yang diperoleh di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Tahapan dalam penelusuran pustaka tersebut sebagai berikut :

- 1) Inventarisasi katalog;
- 2) Mencocokkan bahan sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Mengecek ketersediaan bahan yang akan digunakan;
- 4) Membaca dan memilah bahan yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **F. Populasi, Sample dan Teknik sampling**

### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang memiliki kesamaan meliputi himpunan dari orang, kejadian, kasus yang dibatasi periode

dan lokasi tertentu.<sup>3</sup> Populasi dari penelitian ini adalah Kepolisian Resort Malang Kota.

## 2. Sampel dan Responden

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai obyek penelitian.<sup>4</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Unit PPA dan 2 (dua) anggota Unit PPA Kepolisian Resor Kota Malang serta 1 (satu) korban KDRT, Unit PPA yang khususnya memiliki tugas dalam penanganan kasus KDRT dan berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban KDRT.

## 3. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk menjamin bahwa unit-unit yang dipilih dapat mewakili dari populasi.<sup>5</sup> Dalam penentuan sampel, peneliti menentukan dengan pertimbangan tertentu bahwa unit kepolisian yang dipilih harus memiliki kewenangan untuk menangani kasus KDRT. Hal ini digunakan karena setiap individu dalam populasi tidak memiliki kedudukan yang sama dan tidak dilakukan secara acak.

---

<sup>3</sup> Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 95

<sup>4</sup> Ibid, hlm 96

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 160

## G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah teknik yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Sebelum melakukan analisis data peneliti melakukan pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Setelah dilakukan pengolahan data, maka dilakukan analisis data yang disini peneliti melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif<sup>6</sup>, yaitu mencari solusi sebagai kesimpulan tentang Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Studi Di UPPA Kepolisian Resort Kota Malang). Dalam analisis data ini penulis ingin mengetahui tindak KDRT di Kota Malang kemudian memberikan solusi atau penyelesaian dari permasalahan tersebut.

## H. Definisi Operasional

Merupakan batasan pengertian istilah yang digunakan dalam penelitian ini sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan. adapun batasan tersebut, yaitu:

- a) Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- b) Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

---

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, PT Rineka Cita, Jakarta, 2010, hlm. 20

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- c) Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami,istri,anak atau orang yang hidup dalam rumah tangga tersebut yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan dalam rumah tangga tersebut.











## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Resort Malang Kota

Kota Malang adalah salah satu kota yang berada di provinsi Jawa Timur terletak pada ketinggian 440 - 667 meter di atas permukaan laut, Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak  $112,06^{\circ}$  –  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  –  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang<sup>1</sup>

Sesuai dengan visi misi pembangunan Pemerintahan Kota Malang yang menjunjung tinggi supremasi hukum, peran aparat penegak hukum khususnya kepolisian sangat penting untuk menciptakan keamanan dan

---

<sup>1</sup> <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> di akses pada 21 Maret 2018

ketertiban kepada seluruh masyarakat Kota Malang tanpa terkecuali, batas wilayah tersebut juga merupakan batas wewenang Polisi Resort (yang selanjutnya di sebut Polres) Malang Kota untuk menjalankan tugas pokoknya di wilayah Kota Malang.

Kepolisian Resort Malang Kota merupakan salah satu instansi dari aparat penegak hukum, kepolisian yang sekaligus di bawah naungan Polri (Kepolisian Republik Indonesia) karena kedudukan sebagai aparat penegak hukum, maka kepolisian Resort Malang kota tentunya memiliki kewajiban untuk memberikan rasa nyaman aman dan tertib bagi masyarakat yang berada di bawah wilayah daerahnya.

Kepolisian Resort Malang Kota berada di jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 19 malang, yang tepatnya berada di depan RSUD Dr. Syaiful Anwar Kepolisian Resort Malang Kota di Pimpin seorang Kepala Polisi Resort yaitu AKBP Asfuri, luas daerah jajaran Kepolisian Resort Malang Kota seluas 11.445,30 Ha terletak dibagian selatan timur wilayah Polisi wilayah Malang, meliputi lima Polsekta di bawah pengawasanya yaitu.<sup>2</sup>

- a. Polisi sektor Sukun, menaungi seluruh daerah kecamatan Sukun Kota Malang.
- b. Polisi sektor Kedung kandang, menaungi seluruh daerah kecamatan Kedung kandang Kota Malang.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Lutfhi Nuhadinar Penyidik UPPA Polres Malang Kota, 21 Maret 2018

- c. Polisi sektor Lowokwaru, menaungi seluruh daerah kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
- d. Polisi sektor Klojen, menaungi seluruh daerah kecamatan Klojen Kota Malang.
- e. Polisi sektor Blimbing, menaungi seluruh daerah kecamatan Blimbing Kota Malang.

Berdasarkan UU POLRI Nomor 2 Tahun 2002 wilayah hukum petugas kepolisian adalah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, untuk lebih jelasnya pada pasal 4 sebagai berikut :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melaksanakan amanat Undang-undang yang berlaku dan bertanggung jawab atas daerah hukum dalam sektor masing-masing.

## **2. Visi dan Misi Polres Malang Kota**

Dalam mencapai sebuah tujuan tentunya pasti ada sebuah perencanaan terlebih dahulu sehingga tujuan tersebut dapat lebih mudah di capai, sama halnya dengan itu Kepolisian Resort Malang Kota memiliki perencanaan untuk mewujudkan kinerja yang maksimal bagi masyarakat di



tuangkan pada visi misi yang merupakan konsep perencanaan dengan tindakan guna mencapai sebuah tujuannya.

Visi dari Kepolisian Resort Malang Kota adalah Terwujudnya instansi Polisi resort Malang Kota yang sebagai berikut :

- a. Profesional, yaitu menjunjung tinggi dan melaksanakan semua prosedur penanganan yang berkaitan dengan kepolisian sesuai pada aturan Undang-undang yang berlaku.
- b. Bermoral, yaitu berlaku adil terhadap setiap masyarakat tanpa adanya diskriminatif terhadap golongan tertentu, dan
- c. Modern, yaitu memberlakukan inovatif sesuai perkembangan zaman, sehingga dapat mempermudah kinerja kepolisian untuk melaksanakan tugasnya. Sebagai contoh telah di berlakukanya Elektronik Tilang.

Kepolisian sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum.

Misi dari Kepolisian Resort Malang Kota antara lain :

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan ,pengamanan,penggalangan.
- b. Memberikan perlindungan,pengayoman, dan pelayanan secara mudah,responsive,tidak driskiminatif, dan tidak membebani masyarakat.

- c. Menjaga dan mengatur urusan lalulintas.
- d. Menjamin keberhasilan penggulangan gangguan keamanan dalam negri.
- e. Mengembangkan kepedulian masyarakat agar sadar hukum dan pentingnya keselamatan dalam berlalulintas.
- f. Menegakan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- g. Membangun kerja sama dan sinergi dengan lembaga/instansi terkait dengan seluruh komponen masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negri.<sup>3</sup>

Kepolisian Resort Malang Kota memiliki tanggung jawab dan juga membawahi seluruh Kepolisian sektor yang tersebar di wilayah Kota malang. Sebagai institusi yang besar , maka Polres Malang Kota memiliki srtuktur organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian resor dan Kepolisian sektor yang di mana tiap-tiap bagian mempunyai wewenang dan tugas masing-masing. Yang di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 23 Tahun 2003 Tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja, adalah sebagai berikut.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Lutfhi Nuhadinar Penyidik UPPA Polres Malang Kota, 21 Maret 2018

a. Kepala Polisi Resort (Kapolres)

Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin , membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dalam melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

b. Wakapolres

Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

c. Siwas (kasi pengawas)

Siwas bertugas melakukan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

d. Seksi profesi dan pengamanan (Sipopram)

Kasipropam bertugas untuk melakukan pemeliharaan dan pembinaan disiplin, melaksanakan siding disiplin dan atau kode etik profesi Polri, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan atau PNS Polri, pengamatan internal, serta rehabilitasi personil.

e. Seksi keuangan (sikeu)

Sikeu bertugas untuk melakukan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pengendalian, pembiayaan, akuntansi, pembukaan dan verifikasi, serta pelaporan pertanggung jawaban.

f. Sium ( kasi umum )

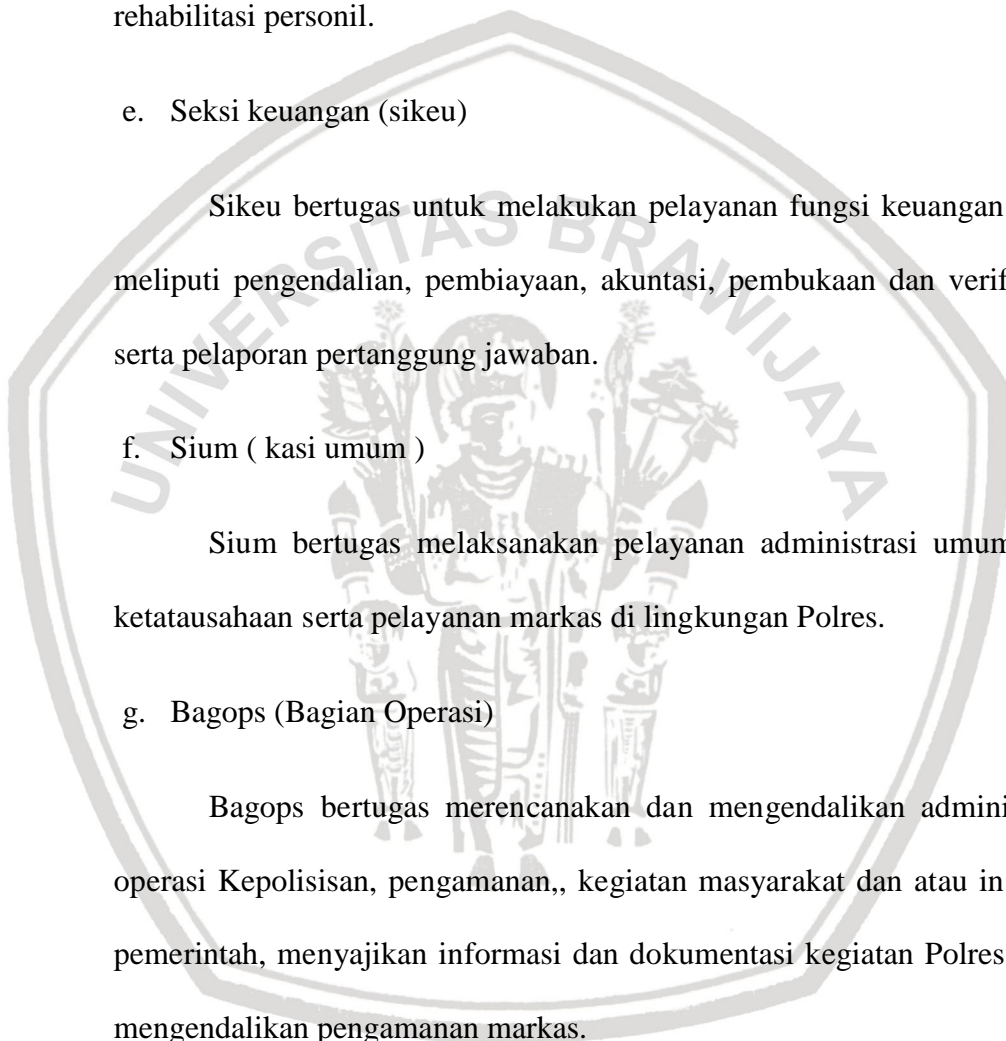
Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

g. Bagops (Bagian Operasi)

Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi Kepolisian, pengamanan,, kegiatan masyarakat dan atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.

h. Bagren (Bagian Rencana Kerja)

Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja, mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.



i. Bagian administrasi

Bagian administrasi bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.

j. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi

k. Satintelkam (Satuan Intelijen Keamanan)

Santintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK. Menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan pengguna bahan peledak.

l. Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal)

Satreskrim bertugas melaksanakan penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan dan koordinasi PPNS.

m. Satresnarkoba (Satuan reserse narkoba)

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

n. Sabtimas ( Satuan bina masyarakat )

Sabtimas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, Pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengaman swakarsa (pamswakarsa), Kepolisian khusus (Polpus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi , lembaga, instansi, dan atau tokoh masyarakat guna meningkatkan kesadaran kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

o. Satuan Samata Bhayangkara ( SatSabara)

Kasat Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan Pengamanan kegiatan masyarakat serta instansi pemerintah, TPTKP, Obyek vital, pengendalian masa dan penanganan Tipiring, dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.



p. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

Satlantas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pelayanan registasi, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmalantas), penyidikan kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum di bidang lalu lintas, dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

q. Satpamobtiv (Satuan Pengamanan Obyek Vital)

Satpamobtiv bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan obyek vital (Pamobtiv) yang meliputi proyek/instalasi vital, obyek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisisan.

r. Satpolair (Satuan Kepolisian Perairan)

Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR.

s. Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti)

Satthti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya dilingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

t. Sitipol (Kasi Telekomunikasi Polisi)

Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi Kepolisian, pengumpulan

dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

u. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek)

Kapolsek bertugas dalam memimpin, mengawasi, membina, mengendalikan dan mengatur satuan organisasi yang berada dilingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk juga kegiatan pengamanan markas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres terkait dalam pelaksanaan tugasnya.<sup>4</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa setiap bagian dalam struktur organisasi Polres Malang Kota memiliki tugas masing-masing yang harus di jalankan sesuai peraturan yang berlaku, struktur tersebut juga menunjukkan adanya pembagian kewenangan terhadap tiap setiap bagian itu bertujuan untuk menapatkan hasil maksimal menjalankan tugas pokok Polri.

Terkait penanganan perkara dari suatu tindak pidana, Satreskrim memiliki peran penting dalam upaya negakan hukum, karena yang memiliki wewenang untuk melakuka penyidikan dan penyelidikan dari suatu tindak pidana adalah Satreskrim. Adapun struktur organisasi Satreskrim Polres Malang Kota adalah sebagai berikut.

---

<sup>4</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 23 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Resort dan Kepolisian Sektor

## Bagan 1

## Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Malang Kota



Sumber : Data Sekunder Polres Malang Kota Diolah 2018

Penjelasan dari tugas masing- masing bagan Kasat Reskrim Polres Malang Kota adalah sebagai berikut :

1. Kaur Mintu adalah Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan bertugas menyelenggarakan urusan administrasi, urusan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk pelayanan keuangan, di lingkungan Sat Lantas.
2. Kaur Bin Ops Reskrim, disingkat KBO Reskrim, adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksanaan staf pada Satreskrim Malang Kota.

3. Ident atau kaur identifikasi berfungsi membantu KBO reskrim dalam pelaksanaan fungsi identifikasi yang meliputi pelaksanaan pengambilan, perumusan, penyimpanan dan pelayanan sidik jari yang menyangkut kriminal maupun non kriminal dan melakukan olah TKP .
4. Kanit PPA berfungsi menangani kasus tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual .
5. Kanit Tipeter berfungsi untuk menangani kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi dan HAKI.
6. Kanit Pidum berfungsi untuk menangani kasus-kasus tindak pidana umum.
7. Kanit Pidsus berfungsi untuk menangani kasus-kasus tindak pidana khusus yang di atur di luar KUHP.
8. Kanit TCC adalah team khusus untuk menangani kejahatan anti bandit.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa setiap bagian dalam struktur organisasi Sat Reskrim Polres Malang Kota memiliki tugas masing-masing yang harus di jalankan sesuai peraturan yang berlaku, struktur tersebut juga menunjukkan adanya pembagian kewenangan terhadap tiap-tiap jenis tindak pidana yang harus di tangani.

Dalam melaksanakan tugasnya di bidang proses pidana kewajiban yang harus di lakukan kepolisian telah di atur dalam pasal 16 ayat (1) UU POLRI Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut :

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

## 2. Gambaran Umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kota

### Malang dan Sejarah Di Bentuknya

#### a. Sejarah Terbentuknya UPPA

Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya disebut (UPPA) terbentuk berdasarkan rasa peduli terhadap maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak, berawal dari kata Derap Warapsari merupakan perpaduan antara Derap dan Warapsari yang berarti Derap adalah rasa welas asih terhadap perempuan sedangkan Warapsari adalah perempuan terpilih, tujuan Derap adalah sebagai jembatan antara masyarakat dan Polri dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Derap berdiri dengan bantuan Ibu asuhan Polwan (polisi wanita), pada 16 april tahun 1999 Kapolda Metro Jaya meresmikan sembilan Ruang Pelayanan Khusus (RPK), Secara organisasi RPK di kendalikan oleh fungsi Reserse dan di laksanakan oleh satuan Polisi wanita (Polwan) sebagai kekuatan inti dari seluruh penyidikan. RPK juga mengemban dan melaksanakan tugas Polri yaitu sebagai penak hukum dan melindungi masyarakat<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Lutfhi Nuhadinar Penyidik UPPA Polres Malang Kota, 21 Maret 2018



Unit PPA di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.pol.10 tahun 2007 dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut<sup>6</sup> :

1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
2. Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21. Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
3. Undang –Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 )
4. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
5. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 )

---

<sup>6</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Keputusan Kapolr No. Pol.: Kep / 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan – Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya.
8. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan – Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah ( Polda ) beserta perubahannya.

Berangkat dari latar belakang diatas maka Polri selaku pihak yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum yang didalamnya juga termasuk wanita dan anak anak menganggap hal ini sebagai suatu hal yang serius dan otomatis juga memerlukan penanganan yang serius pula. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit perempuan dan anak dalam pasal 1 Ayat (1) Penjelasan mengenai UPPA sebagai berikut :

#### Pasal 1

(1)“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.”

## **b. Fungsi dan Tugas UPPA**

### **a. Fungsi UPPA**

Unit PPA merupakan terobosan kepolisian untuk lebih memperhatikan maraknya terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan anak di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. UPPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam melaksanakan tugasnya UPPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum.
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana .
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Unit PPA adalah unit yang di bentuk khusus untuk menjalankan tugasnya, sebagai penyelenggara pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Penyidik UPPA sendiri telah di bekali dengan kemampuan khusus untuk menghadapi dan mengatasi hambatan untuk menangani korban perempuan dan anak sebagai tujuan menciptakan rasa nyaman dan aman ketika korban menghadapi permasalahan hukum. Dalam menjalankan tugasnya UPPA bekerja sama dengan instansi pendukung sehingga dapat mempermudah penyelesaian penanganan korban.

## b. Tugas UPPA

Lingkup tugas UPPA meliputi tindak pidana terkait dengan perempuan dan anak, adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan ( Secara umum ataupun dalam rumah tangga)
2. Perdagangan manusia ( *Human Trafficking* )
3. Asusila (pemeriksaan, cabul, pelecehan)
4. Pornografi dan pornoaksi
5. Prostitusi
6. Memberikan perlindungan terhadap korban, saksi, keluarga terkait serta dengan kasus lain di mana pelakunya atau korbanya adalah perempuan dan anak.<sup>7</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Unit PPA berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit perempuan dan anak dalam pasal 3 menyebutkan bahwa :

### Pasal 3

“Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.”

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Lutfi Nuhadinar Penyidik UPPA Polres Malang Kota, 21 Maret 2018

Dalam menjalankan fungsinya Unit PPA berdasarkan pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit perempuan dan anak sebagai berikut :

#### Pasal 4

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana ;
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait “

Tujuan terbentuknya UPPA sendiri adalah untuk memberikan perlindungan, mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang, atau dengan kata lain membuat jelas tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. Dalam hal ini menekankan pendekatan secara halus dalam mengajukan pertanyaan kepada korban yang mayoritas perempuan dan anak. Adapun setruktur organisasi Unit PPA Polres Malang kota adalah sebagai berikut<sup>8</sup>.

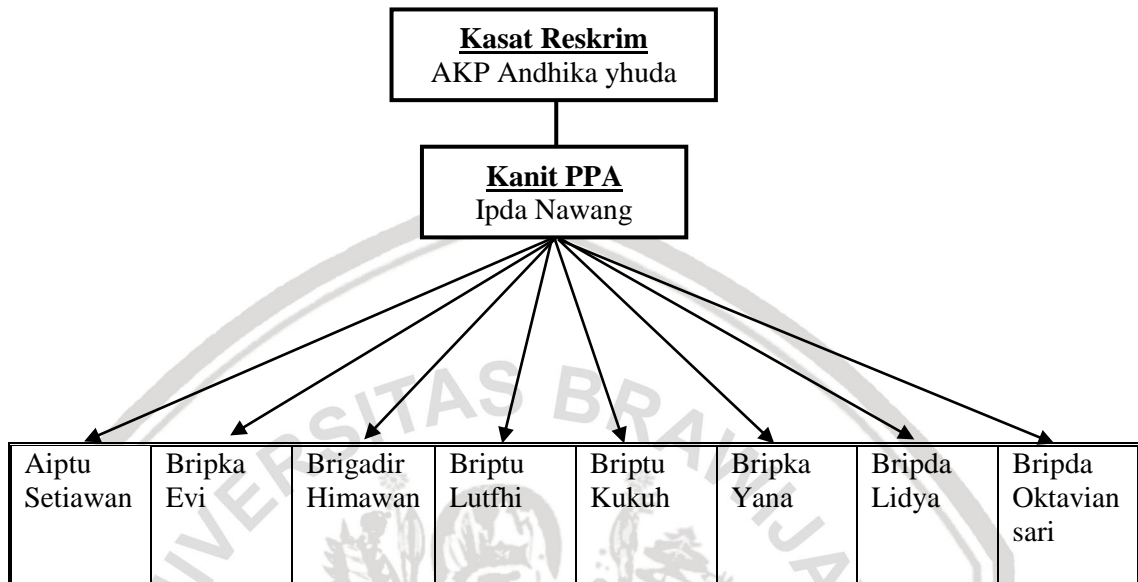
---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bripda Lidya Penyidik UPPA Polres Malang Kota, 21 Maret 2018



## Bagan II

### Struktur Organisasi Unit PPA Polres Malang Kota



**Sumber :** Data sekunder Polres Malang Kota Diolah 2018

Berikut pembagian tugas dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi di atas :

1. Kepala unit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK), melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap korban.
2. Anggota UPPA bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, melaksanakan



penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan serta dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kanit PPA<sup>9</sup>.

Dalam pembagian tanggung jawab dan tugas Unit PPA Polres Malang Kota berpedoman dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit perempuan dan anak dalam pasal 6 menyebutkan bahwa :

#### Pasal 6

- (1) “Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.
- (2) Kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
- (3) Lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang ( human trafficking ), penyelundupan manusia( people smuggling ), kekerasan ( secara umum maupun dalam rumah tangga ), susila ( perkosaan, pelecehan, cabul ), vice ( perjudian dan prostitusi ), adopsi illegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak ( sebagai korban / tersangka ), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus – kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit PPA bertanggung jawab kepada :
  1. di tingkat Mabes Polri kepada Dir I / Kamtrannas Bareskrim Polri.
  2. di tingkat Polda Metro Jaya kepada Kasat Opsnal Dit Reskrimum Polda Metro jaya.
  3. di tingkat Polda kepada Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda
  4. di tingkat Polres kepada Kasat Reskrim Polres”

<sup>9</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia

**B. Dasar-dasar penyidik memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT**

**1. Mekanisme pemberian perlindungan pihak kepolisian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga**

Polisi Republik Indonesia merupakan instansi negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian merupakan salah satu pilar terdepan dalam menangani ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam pasal 13 UU POLRI Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa :

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dalam hal ini salah satu tugas pokok kepolisian adalah memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, dalam aspek tugas dan wewenangnya kepolisian wajib memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, perlunya pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan secara baik bukan saja merupakan isu nasional namun juga merupakan polemik di berbagai negara di dunia ini. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius dari di

bentuknya *Declaration of basic principal of justice for victims of crime and abuse of power* oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi PBB tersebut telah menyarankan agar paling sedikit di perhatikan empat hal sebagai berikut :

1. Korban harus di perlakukan dengan belas kasih dan menghormati martabat mereka untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*)
2. Korban berhak Memperoleh restitusi (pembayaran ganti rugi ) yang di timbulkan oleh pelaku tindak pidana kepada korban secara adil, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan dapat memberikan kompensasi yang layak kepada korban yang telah mengalami tindak pidana serius yang bisa mengakibatkan cedera maupun kematian, kompensasi tersebut dapat di berikan kepada korban , keluarganya, atau mereka yang menjadi tanggungan korban.
4. Korban berhak mendapatkan bantuan materil, medis, psikologi dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat .

Di indonesia perlindungan terhadap korban selama ini masih didasarkan pada KUHAP sebagai sumber hukum materil, berdasarkan KUHAP sebagai hukum acara yang berlaku. Bila kita lihat, di dalam

rumusan KUHP lebih banyak mengatur tentang perlindungan tersangka dari pada perlindungan korban. Kedudukan korban dalam KUHP masih banyak yang harus di perhatikan di bandingkan pengaturan terhadap perlindungan pelaku, KUHP belum secara tegas dalam merumuskan ketentuan secara kongkrit memberikan perlindungan hukum kepada korban seperti contoh dalam hal penjatuhan pidana wajib di pertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban maupun keluarga korban, rumusan dalam KUHP cenderung membahas pada rumusan tindak pidana pertanggung jawaban dan ancaman pidana<sup>10</sup>

Apabila dilihat didalam KUHP, pengaturan mengenai korban sama sekali kurang maksimal. KUHP lebih banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap tersangka, sedangkan perlindungan terhadap korban tidak terumuskan secara lengkap. Hak yang di berikan KUHP terhadap korban sangat terbatas, diantaranya di temukan dalam pasal 98-101 KUHP. Dalam pasal tersebut di atur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang bisa di jalani korban yaitu melalui mekanisme pada pasal 98 KUHP yang di sebut penggabungan perkara ganti kerugian<sup>11</sup>.

Berdasarkan pada Undang-Undang LPSK Nomor 13 tahun 2006 yang secara khusus mengatur tentang hak-hak saksi dan korban di luar KUHP memberikan pengertian tentang perlindungan yaitu segala upaya

---

<sup>10</sup> Rena yulia, Op.cit, hlm. 181

<sup>11</sup> Ibid hlm 182

pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting, karena setiap masyarakat kelompok maupun individu bersiko menjadi korban pelaku kejahatan. Selaras dengan maraknya macam-macam kejahatan yang sering terjadi yang menjadi perhatian khusus iyalah maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam masyarakat, maka berdasarkan hal tersebut sudah semestinya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga lebih di perhatikan. Berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang PKDRT telah mengatur hak-hak korban maupun larangan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Rumah tangga yang bahagia akan memberikan dampak positif bagi anak-anak maupun keharmonisan hubungan keluarga, untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan rasa aman anggota keluarga harus saling menyayangi dan menghargai satu sama lain, karena setiap orang memiliki hak yang sama ,dan berhak di perlakukan adil tanpa diskriminasi di mata hukum.

Batasan perbuatan seseorang yang tidak melanggar hak orang lain sudah selayaknya di peroleh oleh setiap orang, rasa aman sudah selayaknya di peroleh oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, baik dari pihak keluarga, kepolisian maupun masyarakat, perlindungan hukum



bagi korban kekerasan dalam rumah tangga telah di atur berdasarkan UU PKDRT kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan sementara
2. Penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan
3. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK)
4. Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif
5. Pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Ada beberapa perlindungan yang di berikan kepada korban oleh undang-undang PKDRT, namun penulis memfokuskan pada perlindungan sementara yang di berikan pihak kepolisian kepada korban. Perlindungan sementara merupakan perlindungan pertama yang harus di lakukan oleh kepolisian, perlindungan sementara sangat penting di berikan kepada korban PKDRT karena sifatnya mendesak, sebab apabila tidak di berikan perlindungan sementara korban bisa mendapat kekerasan susulan ketika pulang ke rumah oleh pelaku , dan alasan lain adalah apabila korban harus menunggu proses surat perintah pengadilan yang memakan waktu, yaitu sekitar tujuh hari dari laporan di buat.

Kepolisian sebagai instansi yang berwenang memberikan perlindungan sementara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, maka sudah semestinya kepolisian memberikan rasa aman kepada korban.

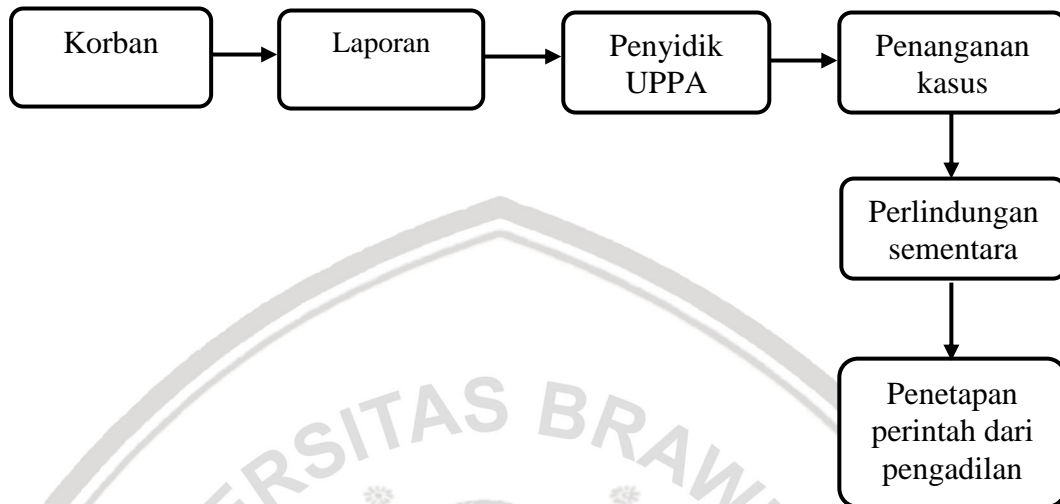


terkait dengan permasalahan perlindungan sementara, kepolisian melaksanakan kewajibanya yang tertuang dalam UU PKDRT Nomor 23 tahun 2004 pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”

Berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan sementara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah mendesak, di dasarkan kepada keadaan yang memungkinkan mendapatkan intimidasi dari pelaku kejahatan, memberikan perlindungan sementara merupakan kewajiban yang di miliki pihak kepolisian untuk dilaksanakan. Namun terdapat kelemahan dalam pasal 16 dimana tidak terdapat sanksi terhadap penyidik apabila tidak memberikan perlindungan sementara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga .

Pemberian perlindungan dari pihak kepolisian untuk korban kekerasan dalam rumah tangga di mulai sejak adanya aduan atau laporoan adanya KDRT yang di terima dan di tangani oleh pihak kepolsian. Adapun bagan alur pemberian perlindungan kepada korban adalah sebagai berikut :

**Bagan III****Pemberian Perlindungan Kepada Korban KDRT**

(sumber : data primer,2018,diolah)

Mekanisme di atas merupakan tahapan permulaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban ketika ingin mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian haruslah melakukan laporan atau aduan terlebih dahulu kepada kepolisian setempat, lalu penanganan dilakukan oleh satreskrim yang bertugas khusus menangani tindak pidana KDRT yaitu Unit PPA, setelah dilakukan penanganan kasus pihak kepolisian melalui Unit PPA baru bisa memberikan perlindungan permulaan untuk korban.

Namun dalam kenyataannya tidak semua korban mendapatkan perlindungan sementara, bripda lutfhi salah satu anggota UPPA Polisi Resort Malang Kota menyatakan bahwa ada ketentuan khusus untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam

rumah tangga, meski tidak ada ketentuan di dalam UU PKDRT yang menyebutkan ketentuan sebagai mana korban mendapatkan perlindungan harus ada ketentuan khusus. Dalam penerapan tersebut jelas sangat berbeda dengan yang ada di lapangan, proses pemberian perlindungan sementara di Unit PPA Polres Malang Kota di berikan dengan kreteria korban telah dua kali menjadi pelapor untuk kasus KDRT<sup>12</sup>.

Dalam hal ini korban setelah melakukan pelaporan pertama lalu mendapatkan solusi dengan mediasi dan kesepakatan berdamai dengan pelaku, setelah itu jika korban masih mendapatkan kekerasan oleh pelaku, maka pada pelaporan ke dualah korban KDRT tersebut baru bisa mendapatkan perlindungan sementara oleh pihak Kepolisian Unit PPA Polres Malang kota, jika di lihat dalam aspek keamanan bagi korban, hal ini sangat merugikan karena pada waktu korban kembali ke rumah pasti ada intimidasi dari pelaku secara spikis maupun fisik, hal ini lah yang seharusnya di cegah dengan pemberian perlindungan sementara tersebut.

#### **4. Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga untuk di berikan perlindungan**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Lutfhi Nuhadinar Penyidik UPPA Polres Malang Kota, 21 maret 2018

masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya adalah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang berada di dalam rumah tangga tersebut.

Masalah korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian dari aparat, masyarakat dan negara, bukan hanya karena kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga dampak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bagi korbannya yang tidak hanya mengalami kerugian materiil (fisik), melainkan juga mengalami kerugian immateriil (psikis).

Kejahatan kekerasan adalah tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.<sup>13</sup>

Mengenai batasan definisi kekerasan dalam rumah tangga ini di rumuskan dalam pasal 1 angka 1 UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

---

<sup>13</sup> Arif Gosita, **Masalah korban kejahatan**, CV Akademi Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 44

Lingkup rumah tangga yang di maksud adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU PKDRT yaitu sebagai berikut :

”(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:  
a. suami, isteri, dan anak;  
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau  
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangg tersebut.”

Korban kejahatan secara sederhana dapat diartikan sebagai pihak yang telah dirugikan atau yang telah mengalami penderitaan atas terjadinya suatu kejahatan. Para ahli dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Korban mempunyai definisi yang beragam mengenai korban, sebagai berikut :

Korban adalah orang atau kelompok yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita<sup>14</sup>.

Sedangkan dalam pengertian salah satu pendapat ahli hukum korban adalah orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental,

---

<sup>14</sup> Ibid hlm 65.



melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.<sup>15</sup>

Secara normatif, peraturan Perundang-undangan telah merumuskan pengertian korban. Di antaranya adalah sebagai berikut :

Undang-Undang LPSK No. 13 Tahun 2006 memberikan definisi mengenai korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Undang-undang PKDRT Nomor 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

#### **a. Analisis dalam ruang lingkup filosofis**

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana cenderung dilupakan dan kurang diberikan perhatian. Seharusnya perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan dan pelaku kejahatan adalah seimbang dan tidak dapat dibedakan sebagaimana asas setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum *equality before the law*. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

---

<sup>15</sup> Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Op.cit, hlm.47



Prinsip tersebut bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.

Praktek penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.

Dalam hal ini mekanisme perlindungan korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan kurang lebih 14 tahun akan tetapi sangat sulit untuk dijalankan secara efektif di dalam suatu kerangka sistem hukum nasional yaitu menuju suatu perubahan atau pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia dengan suatu sistem peradilan pidana yang bukan saja adil terhadap tersangka tetapi juga adil bagi saksi dan korban sebagai suatu penegakan hukum yang adil dan memenuhi perlindungan hak asasi manusia, yaitu memberikan kedudukan seimbang antara korban dan pelaku di dalam hukum yang berlaku.

Meningkatnya kasus KDRT tetapi penyelesaiannya masih jauh dari harapan masyarakat yang selalu mendambakan putusan pengadilan yang memenuhi keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan lahirnya Undang-undang PKDRT

No. 23 Tahun 2004 yang merupakan tonggak sejarah di Indonesia sebagai terobosan pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai realisasi dari konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang ini menjadi harapan untuk para korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan.

Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut telah tertuang dalam diktum UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut :

1. “Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
3. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.”

Dengan demikian korban kekerasan dalam rumah tangga berhak atas hak-hak mereka yang tercantum dalam undang-undang PKDRT dan Undang-undang lain yang terkait, hal ini selerah dengan tujuan di bentuknya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**b. Analisis dalam ruang lingkup sosiologis**

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian khusus dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering di tuntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum dari adanya pasal 16 Undang-undang PKDRT.

Mengacu pada kasus KDRT yang sering marak terjadi di semua golongan masyarakat meski sudah ada Undang-undang yang mengatur ketentuan tersebut yaitu Undang-undang PKDRT No 23 tahun 2004 namun dalam penerapanya khususnya perlindungan terhadap korban kurang di perhatikan.

Bila dilihat dari ketentuan yang mengatur pasal 16 UU PKDRT Nomor 23 tahun 2004 menyebutkan perlindungan terhadap korban, salah satunya adalah perlindungan sementara yang harus degera di berikan setelah korban melapor ke kepolisian dengan kasus KDRT, sangat di

sayangkan ketentuan tersebut tidak berjalan sesuai realita di lapangan. Banyak korban KDRT yang tidak di berikan perlindungan permualaan yaitu perlindungan sementara.

Sebagai contoh Ani (bukan nama sebenarnya) warga kota malang yang berdomisili di kecamatan lowokwaru pernah mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga, kronologi kasus sebagai berikut, bermula pada pagi hari sekitar pukul 04.00 subuh suaminya yang bekerja sebagai tukang ojek di daerah stasiun kota baru malang pulang dengan keadaan mabuk, memang tidak seperti kebiasaanya suaminya entah ada masalah atau terjadi sesuatu, setelah suaminya sampai di rumah dia langsung mengetok pintu dengan keras, sedangkan pada waktu itu ibu ani dalam keadaan tidur perlu waktu untuk bangun dan membukakkan pintu, namun selang 5 menit pintu di bukakakan oleh bu ani suaminya marah dan langsung menonjok korban Ani sehingga bibirnya sampai berdarah.<sup>16</sup>

Setelah itu Ani membuat laporan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Malang Kota, sebagai pihak yang berwenang atas dearah hukumnya, perlindungan sementara tersebut tidak di berikan kepada korban, meski korban tidak tahu menahu tentang prosedur perlindungan secara normatifnya tetapi seharusnya pihak kepolisian memberikan pengarahannya agar korban berada di tempat aman terlebih dahulu. Karena jika korban di biarkan kembali kerumah hal tersebut bisa kembali terulang, dengan menunggu hasil penyidikan polisi seharusnya memberikan

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ani korban kekerasan dalam rumah tangga, 23 Maret 2018

perlindungan sementara terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang ditetapkan di dalam Undang-undang PKDRT.

Dengan kurangnya perlindungan terhadap korban dapat menyebabkan korban bersifat pasif dan cenderung non-koorpretif dengan petugas, bahkan terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan dengan keengganan korban untuk melapor kepada aparat penegak hukum.<sup>17</sup>

### c. Analisis dalam ruang lingkup undang-undang

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu mempunyai hak-hak yang dapat di peroleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut di antaranya termuat dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk :

1. “Memperloeh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah di berikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahuai dalam hal terpidana di bebaskan.
9. Mendapat identitas baru
10. Mendapat tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
12. Mendapat nasihat dan atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup semenatar sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Ani korban kekerasan dalam rumah tangga, 23 Maret 2018



Adapun hak-hak korban di dalam UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

#### Pasal 10

Korban berhak mendapatkan:

- a.”perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihaklainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.”

Di dalam UU PKDRT tidak hanya mengatur tentang hak-hak korban namun juga mengatur tentang kewajiban kepolisian memberikan perlindungan kepada korban, beradasrkan pasal 16 UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- “(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”

Dalam penegakan hukum nasional seharusnya di laksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum tersebut, yang telah di atur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban ternyata hingga sekarang hanyalah sebuah regulitas yang bersifat rutin namun tanpa makna



ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban bahkan sebagai pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Berikut beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :

a. Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat, yang pertama yaitu : untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian di pandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang kongkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang di perbuat pelaku.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Rena Yulia, loc. cit. hlm 59

<sup>19</sup> Chaerudin dan Syarif Fadilah, **Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam**, Grhadika Press, Jakarta, 2004 hlm 65

b. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang di timbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian korban. Tolak ukur yang di gunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskanya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban berstatus sosil lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tingdari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih di utamakan.<sup>20</sup>

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya , khususnya yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai berjalanya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu di peroleh dari pemerintah atau dana umum.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 65

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 69-70

Meski telah di atur di dalam peraturan Perundang-undangan yang seharusnya menjadi pedoman oleh penyidik dalam hal ini khususnya kepolisian yang merupakan pintu pertama dalam penerapan hukum dan untuk memperoleh keadilan, namun dalam kenyataanya berbanding terbalik, masih banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan.

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan dalam perlindungan korban dengan berdasarkan Undang-undang PKDRT yaitu tentang kewajiban kepolisian memberikan perlindungan sementara terhadap korban.

Setelah melakukan penelitian di lapangan penulis tidak mendapatkan korelasi antara pertauran dengan proses penerapan di masyarakat dengan hasil wawan cara kepada salah satu anggota Unit PPA Polres Kota Malang yaitu Brida Lidya dalam kurun waktu 2015 – 2017 Unit PPA Polres Malang Kota belum pernah memberikan perlindungan sementara terhadap korban.

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa penerapan dalam memberikan perlindungan sementara terhadap korban KDRT perlu sangat di perhatikan untuk kedepanya, karena korban berhak memiliki rasa aman atas hak asasi mereka di mata hukum, sehingga hukum dengan penegak hukum bisa berjalan dengan harmonis sesuai tugas dan fungsi untuk memberikan keadilan bagi para pencarinya.

**C. Kriteria yang harus di penuhi penyidik agar korban di berikan perlindungan sementara**

**1. Diskripsi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh penyidik Unit PPA Polres Malang Kota**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga memang harus melalui penanganan khusus, seperti yang terjadi korban KDRT kebanyakan adalah perempuan, dan merupakan kejahatan yang terjadi di dalam keluarga sehingga dalam masyarakat masih di anggap tabu, karena merupakan aib bagi keluarga tersebut.

Dalam penanganan korban KDRT Unit PPA Polres Malang Kota melakukan metode pendekatan kepada korban, yaitu secara halus memberikan rasa nyaman terlebih dahulu sehingga korban tidak merasa tertekan dan bisa menjelaskan kronologi kasus yang terjadi dan agar mempermudah penyidik untuk melakukan penyidikan.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan pemberian perlindungan kepada korban KDRT, ada tahapan-tahapan yang harus di lakukan agar pihak kepolisian bisa menangani kasus tersebut dan melakukan tindakan sesuai prosedur, adapun tahapan yang harus di lakukan korban sesuai dengan penanganan kasus di Unit PPA Polres Malang Kota adalah sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Lutfhi Nuhadinar Penyidik UPPA Polres Malang Kota, 21 Maret 2018

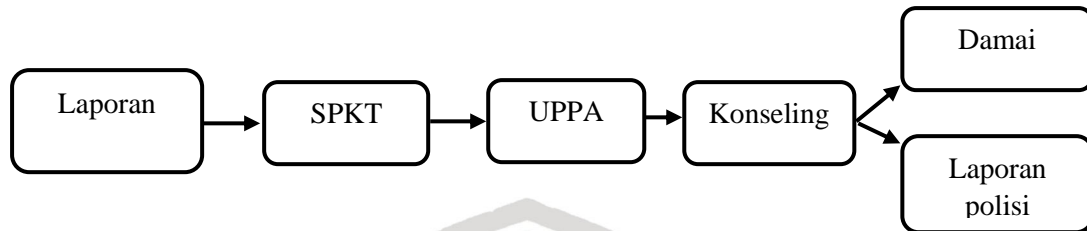
2. Korban harus melakukan aduan terlebih dahulu karena KDRT ke SPKT ( sentral pelayanan kepolisian terpadu ) karena merupakan delik aduan, di mana jika tidak ada pelaporan terlebih dahulu maka tidak akan ada tindakan dari pihak kepolisian.
3. Melakukan wawancara kepada korban terakit dengan kronologi yang terjadi, karena ini merupakan tahapan pertama pihak kepolisian melakukan analisis duduk perkaranya.
4. Melakukan *Visum et repectum*, jika terdapat luka setelah terjadinya kekerasan tersebut.
5. Melakukan pemanggilan saksi dalam kekerasan KDRT tersebut.
6. Melakukan penanganan pertama dengan mediasi, jika bisa di selesaikan secara damai maka kasus di hentikan, jika tidak di lanjutkan untuk membuat laporan polisi.
7. Jika pelaku dan korban tidak menemui kata sepakat dalam proses mediasi, maka akan di lanjutkan sidang perkara di pengadilan.<sup>23</sup>

Di atas merupakan proses dalam penanganan korban KDRT di Unit PPA Polres Malang Kota untuk lebih jelasnya, penulis akan membuat bagan bagaimana alur pertahap agar lebih mudah di pahami dan di mengerti, adapapun bagan penanganan pertama adalah sebagai berikut :

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Nawang Kanit UPPA Polres Malang Kota, 21 Maret 2018



**Bagan IV****Penanganan Awal Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

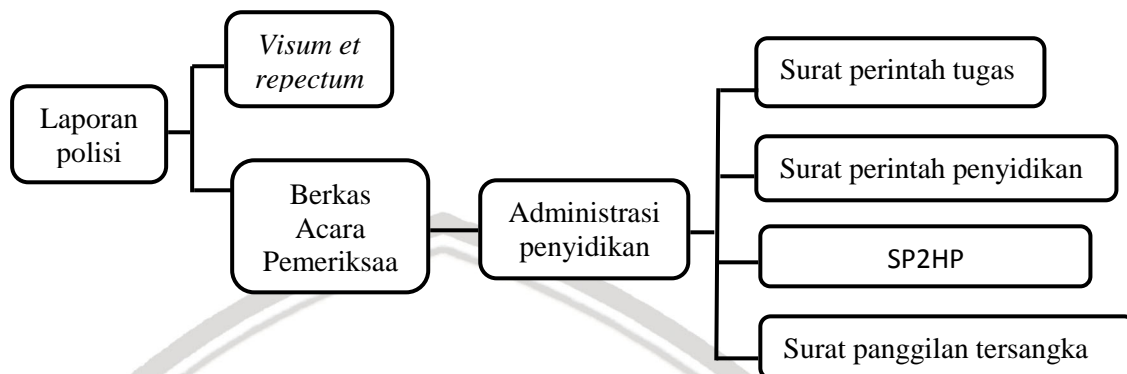
(Sumber : Data sekunder,diolah 2018)

Dari bagan di atas permulaan awal penanganan kasus KDRT di Polres Malang Kota adalah korban melakukan laporan ke SPKT setelah di tentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, lalu untuk selanjutnya di serahkan ke Unit PPA, di Unit PPA di berikan konseling secara mediasi untuk penyelesaian masalah karena pertimbangan untuk mempertahankan keutuhan keluarga adalah lewat perdamaian . Jika dalam tahap mediasi belum sepakat untuk berdamai dan korban ingin memberikan efek jera kepada pelaku maka mekanisme untuk penanganan tahap kedua yaitu laporan kepolisisan adalah sebagai berikut :



## Bagan V

### Penanganan Lanjutan Kasus Kekerasan Dalam RumahTangga



(Sumber: Data sekunder,diaolah 2018)

Ketika dalam tahap satu yaitu konseling tidak menemui solusi, korban dapat membuat laporan polisi untuk penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, setelah korban melakukan paloran polisi, korban akan melakukan *Visum et repectum* di Rumah Sakit Saiful Anwar yang terletak di depan Kepolisian Resort Malang Kota, korban kembali ke Unit PPA untuk di mintai keterangan lebih lanjut sebagai dasar pembuatan Berkas Acara Pemeriksaan, setelah BAP selesai berlanjut ke Administrasi penyidikan dalam tahap ini akan di keluarkan surat tugas, setelah itu surat penyidikan, kemudian penyidik membuat surat pemberitahuan perkembangan penyidikan (SP2HP), tahap selanjutnya adalah pemanggilan tersangka untuk di mintai keterangan dan menggali iformasi dalam proses penyidikan.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Nawang Kanit UPPA Polres Malang Kota,21 Maret 2018

Pada pembahasan sebelumnya tercatat beberapa kasus yang masuk ke Polres Malang kota dalam kurun waktu 2015 – 2017 yaitu berjumlah 137 kasus. Dari 137 kasus tersebut seharusnya semua korban mendapatkan perlindungan sementara, namun dalam penanganannya tidak demikian tidak ada korban yang mendapatkan perlindungan sementara, dalam penanganannya korban mendapat perlindungan berupa pemulangan ke rumah orang tuanya, atau korban akan di pulangkan ke rumahnya dengan pemberitahuan aparat desa bahwa korban telah mengalami KDRT, berikut tabel pemberian perlindungan Unit PPA Polres Malang Kota.

**TABEL III**

**Data Korban Penerima Perlindungan Di Unit PPA Polres Malang Kota**

No	Tahun	Di kembalikan ke rumah orang tua	Di kembalikan kerumahnya dengan pengawasan aparat desa
1	2015	29	40
2	2016	17	14
3	2017	22	14

(Sumber : Data skunder,diolah 2018)

Dari data di atas menunjukan bahwa kepolisian tidak menjalankan amanat Undang-undang dengan baik, dapat kita lihat bahwa jika seorang korban KDRT khususnya kekerasan fisik akan menimbulkan traumatis yang sangat berat sedangkan perlindungan yang di berikan kepolisian Unit PPA tersebut tidak memberikan solusi untuk keamanan korban, dengan di lakukanya pengembalian korban kerumahnya meski dengan kordinasi

aparat desa yang bertujuan sebagai pengawas namun hal ini tidak efektif karena kejadian tersebut terjadi di dalam rumah, sedangkan aparat desa tidak mungkin mengawasi di dalam rumah tersebut.

Perlindungan yang di berikan oleh kepolisian Resort Malang kota harus dengan kemauan korban,jika korban tidak meminta perlindungan maka pihak kepolisian tidak meberikan perlindungan teersebut<sup>25</sup>, hal ini yang di anggap kurang tepat karena korban memiliki hak untuk di lindungi sedangkan dalam penerapanya banyak korban yang belum “melek” aturan tentang hak-hak nya dalam hukum.

Dalam hal jika korban inginnginkan perlindungan sementara di berikan ada kretria yang harus di penuhi, berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik Unit PPA Polres Kota Malang pemberian perlindungan sementara memang selama ini belum maksimal karena di rasa tidak terlalu mendesak namun kenyataannya perlindungan sementara sangat di perlukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban, Briptu lutfhi selaku penyidik Unit PPA mengatakan perlindungan sementara di lakukan apabila korban mengalami 2 (dua) kali kasus KDRT. Yang hal ini tidak di atur di dalam Undang-undang PKDRT namun menjadi ukuran penyidik untuk memberikan perlindungan sementara.

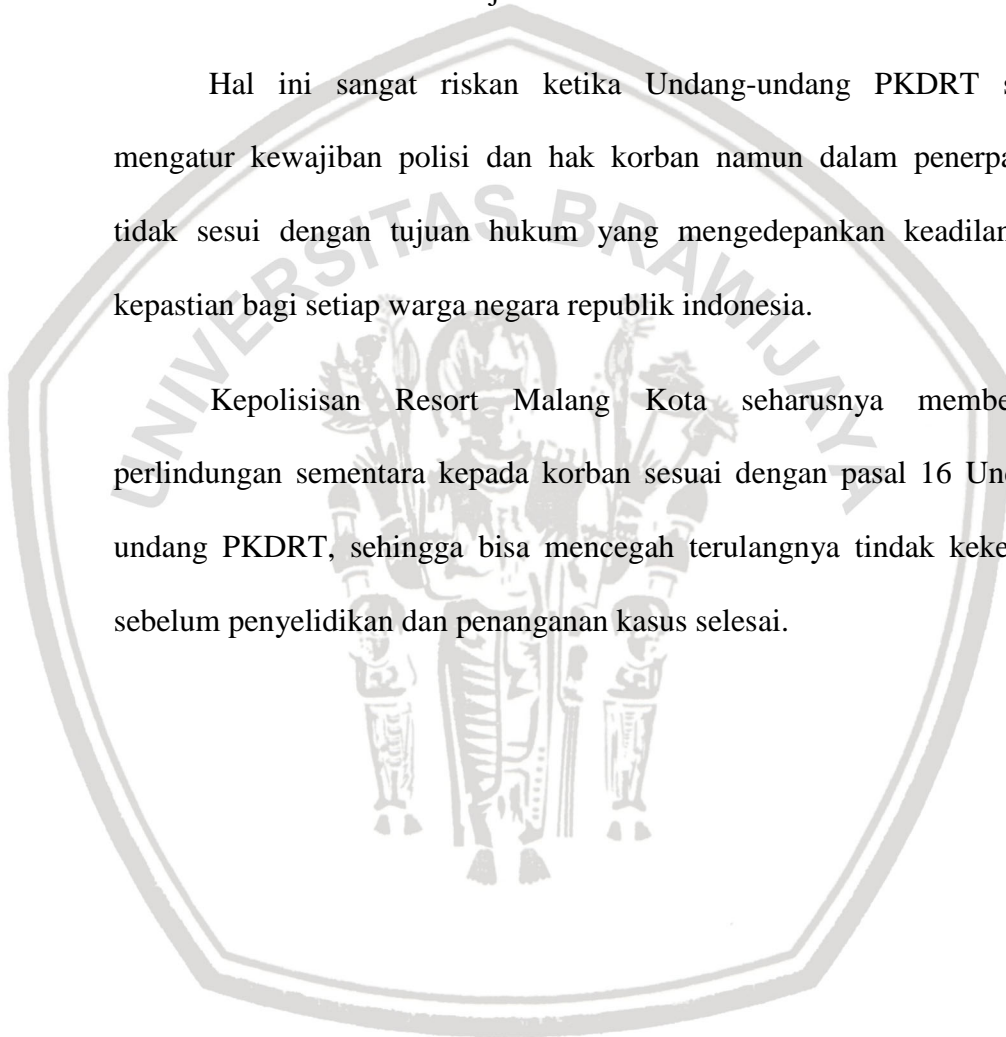
---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Lutfhi Nuhadinar Penyidik UPPA Polres Malang Kota,21 Maret 2018

Berdasarkan kriteria yang disampaikan oleh salah satu penyidik Unit PPA tersebut tentang syarat pemberian perlindungan sementara sangat-sangat merugikan korban, karena korban yang dalam ancaman harus menunggu kejadian kekerasan berikutnya baru bisa mendapatkan haknya untuk di lindungi yang seharusnya sudah di dapatkan langsung ketika kasus kekerasan itu terjadi.

Hal ini sangat riskan ketika Undang-undang PKDRT sudah mengatur kewajiban polisi dan hak korban namun dalam penerpannya tidak sesuai dengan tujuan hukum yang mengedepankan keadilan dan kepastian bagi setiap warga negara republik indonesia.

Kepolisian Resort Malang Kota seharusnya memberikan perlindungan sementara kepada korban sesuai dengan pasal 16 Undang-undang PKDRT, sehingga bisa mencegah terulangnya tindak kekerasan sebelum penyelidikan dan penanganan kasus selesai.



## 2. Kewajiban Penyidik Dalam Hal Memberikan Perlindungan Kepada Korban

Di dalam hukum acara pidana telah mengatur tentang kewajiban penyidik dalam pelaksanaan tugasnya yaitu tercantum dalam pasal 7 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

### Pasal 7 ayat 1

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotre seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”

Dalam pasal tersebut bisa di lihat bahwa korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan hukum yang sifatnya imateriil maupun materiil. Korban kejahatan di tempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh kekeluasaan dalam memperjuangkan haknya sangat kecil. Dapat dilihat bahwasanya rumusan yang menyebutkan perlindungan kepada korban

tidak di atur secara jelas, hal ini menunjukan bahwa KUHAP lebih berfokus kepada tersangka dan mengabaikan hak-hak korban kejahatan.

Di dalam Undang-undang Polisi Republik Indonesia, kepolisian memiliki tugas wajib dalam menjalankan tugas pokoknya, antara lain telah di atur dalam rumusan pasal 13 Undang-undang POLRI Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut :

### Pasal 13

- “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - b. menegakkan hukum, dan
  - c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dari uraian pasal di atas Polisi memiliki tugas pokok untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tugas pokok kepolisian adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, dalam artian polisi sebagai penyidik yang berwenang menangani kasus tindak pidana seharusnya polisi juga melakukan perlindungan terhadap korban kejahatan, meski dalam Kitab Hukum Acara kedudukan korban kurang di perhatikan hak-haknya namun dalam tugas pokok polisi wajib memberikan perlindungan.

Bila dilihat pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu di dalam Undang-undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 terdapat pasal yang mengatur kewajiban polisi sebagai berikut :



## Pasal 16

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”

Dari rumusan pasal di atas, pengaturan terhadap perlindungan korban KDRT telah di atur secara jelas, polisi wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu tujuh hari setelah korban di tangani, karena ketika korban tidak di berikan perlindungan sementara ada faktor-faktor yang akan mengganggu keamanan korban antara lain :

1. Ancaman dari pihak pelaku KDRT kepada korban.
2. Pengulangan tindak kekerasan kepada korban.
3. Rasa tidak aman yang akan mengganggu keadaan psikis korban.

Hal ini lah yang seharusnya di cegah dengan pemberian perlindungan terhadap sementra terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penanganan kasus KDRT penyidik Unit PPA Polres Malang Kota bertindak hanya untuk mengedepankan pada penanganan terhadap pelaku, tetapi juga harus mengedepankan dan memperhatikan tentang hak-hak dari korban KDRT tersebut. Tindakan tersebut untuk memberikan

keadilan dan keseimbangan dalam penanganan kasus KDRT, agar pelaku dan korban mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum.

Perlindungan yang di berikan oleh Unit PPA kepada korban KDRT belum maksimal karena banyak mengesampingkan hak-hak korban, seharusnya perlindungan yang di berikan sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-undang PKDRT yaitu setelah laporan korban di terima polisi berkewajiban memberikan perlindungan sementara kepada korban selama tujuh hari, setelah itu baru menunggu surat penetapan dari pengadilan. Karenan dengan perlindungan yang Unit PPA Polres Malang Kota yaitu pengembalian korban kerumahnya dan kerumah orangtunya tidak menjamin keamanan korban, sehingga bisa menyebabkan pengulangan tindakan kekerasan tersebut.

Dalam penanganan kasus KDRT meski korban tidak memberitahu untuk meminta perlindungan kepada polisi, seharusnya polisi memberikan perlindungan tersebut, karena menjelaskan hak-hak korban juga merupakan kewajiban penyidik sebagai pelaksana hukum dalam undang-undang.

Menurut Jeremy Bentham berdasarkan teori Utilitarian (1748-1831) ,tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung

apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).<sup>26</sup>

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.

Dengan tidak adanya sanksi kepada penyidik atas dasar tidak melaksanakan perintah kewajiban dari perundang-undangan membuat penerapan hukum di lapangan kurang maksimal hal ini menunjukan kemanfaatan hukum belum tercapai karena manfaat keadilan yang di peroleh masyarakat belum maksimal , bisa kita lihat di Undang-undang PKDRT pasal 16 bahwa kewajiban penyidik memberikan perlindungan sementara kepada korban, namun pada kenyataannya penerpan perlindungan tersebut kurang maksimal karena memang ketika penyidik

---

<sup>26</sup> Sonny Keraf, **Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya**, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 93-94

tidak melaksanakan kewajibannya tidak ada pemberian sanksi kepada penyidik dalam undang-undang tersebut, seharusnya Undang-undang tersebut mengatur sanksi kepada penyidik yang tidak menjalankan kewajibannya agar penerapan hukum bisa berjalan seimbang dan penyidik lebih bertanggung jawab atas kewajibannya dalam hal ini memberikan perlindungan sementara kepada korban.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

##### **1. Dasar-dasar pertimbangan penyidik memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga**

Pemberian perlindungan penyidik Unit PPA Polres Malang Kota di dasarkan kepada keinginan korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan, bukan dari prosedur yang di lakukan oleh penyidik, ketika korban tidak membutuhkan perlindungan, penyidik akan pasif dan menunggu keinginan korban untuk meminta perlindungan.

##### **2. Kriteria yang harus di penuhi oleh penyidik agar korban di berikan perlindungan sementara**

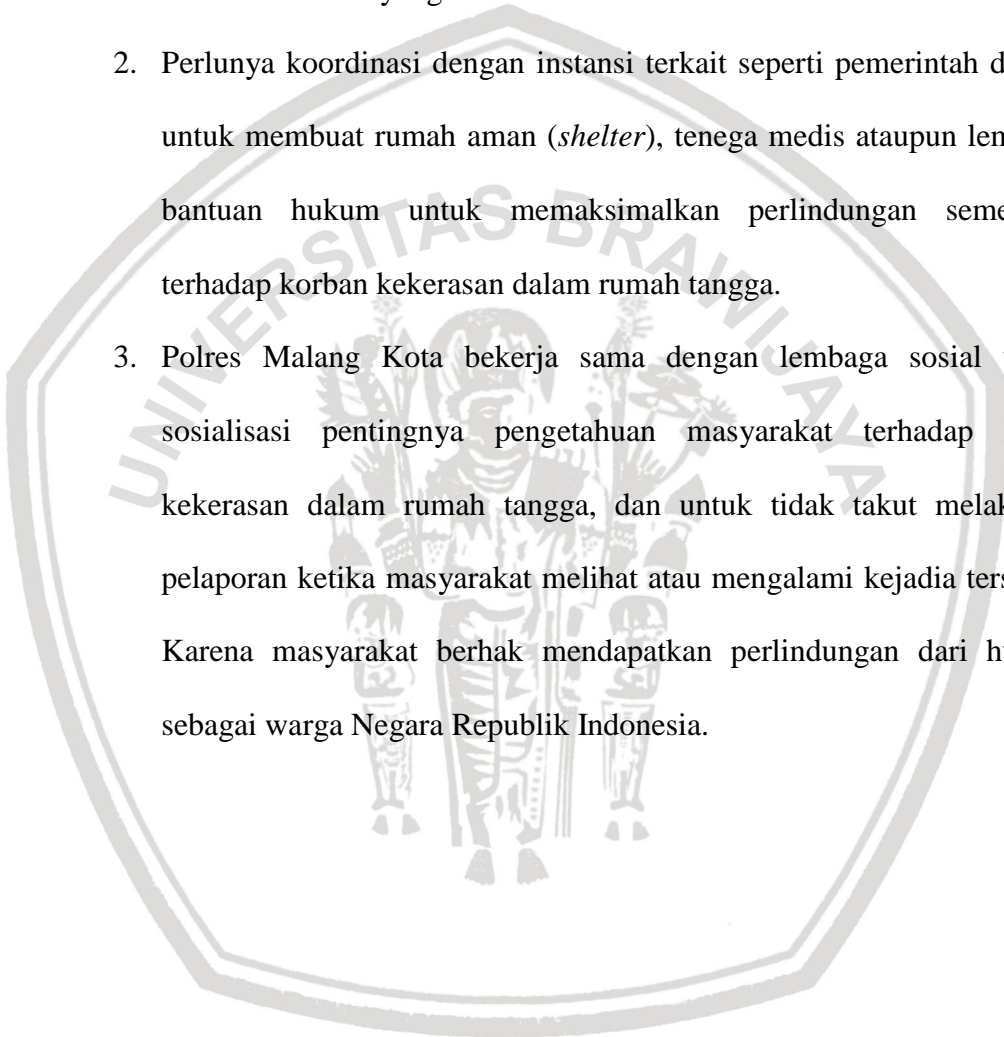
Pemberian perlindungan penyidik Unit PPA Polres Malang Kota kepada korban kekerasan dalam rumah tangga belum maksimal dengan apa yang tertuang di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam pemberian perlindungan sementara kepada korban penyidik mempunyai kriteria khusus yaitu apabila korban mengalami 2 (dua) kali kasus KDRT baru bisa di berikan perlindungan sementara kepada korban. Dan hal ini tidak di atur dalam UU PKDRT namun menjadi ukuran untuk memberikan perlindungan sementara.

#### B. SARAN

Saran agar pemberian perlindungan sementara bisa di laksanakan lebih optimal adalah :



1. Polres Malang Kota seharusnya mengadakan penyuluhan tentang perlindungan hukum khususnya bagi korban kekerasan dalam rumah tangga kepada para penyidik Unit PPA guna meningkatkan kualitas penyidik dan memberi pemahaman tentang kewajiban penyidik agar ketentuan dalam pasal 16 Undang-Undang PKDRT bisa di jalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Perlunya koordinasi dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah untuk membuat rumah aman (*shelter*), tenaga medis ataupun lembaga bantuan hukum untuk memaksimalkan perlindungan sementara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Polres Malang Kota bekerja sama dengan lembaga sosial untuk sosialisasi pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk tidak takut melakukan pelaporan ketika masyarakat melihat atau mengalami kejadian tersebut. Karena masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia.





## DAFTAR PUSTAKA

Amirudin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rena yulia, 2013, **Viktimologi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**, Graha Ilmu,

Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, CV. Mandar Maju, Bandung.

Bambang Sunggono, 2002, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C. Maya Indah S, 2014, **Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi**, KENCANA, Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita**, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta

Emilda Firdaus, 2015, **Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta.

H. Siswanto Sunarso, 2012, **Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Pudi Rahardi, 2007, **Hukum Kepolisian (profesionalisme dan reformasi)**, Laksbang Mediatama, Surabaya

Lilik Mulyadi, 2010, **Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat**

**Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh  
Korban Kejahatan**, CV. Mandar Maju, Bandung.

Maidin Gultom, 2013, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan  
Perempuan**, PT Refika Aditama, Bandung.

Moerti Hadiati Soeroso, 2010, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam  
Perspektif Yuridis-Viktimologis**, Sinar Grafika, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2005, **Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review**, UII  
Press Yogyakarta.

Thomas Santoso (Ed), 2002, **Teori-Teori Kekerasan**, Galia Indonesia,  
Jakarta.

Burhan Ashshoofa, 2010, **Metode Penelitian Hukum**, PT Rineka Cipta,  
Jakarta

Chaerudin dan Syarif Fadilah, 2004, **Korban Kejahatan Dalam Perspektif  
Viktimologi dan Hukum Pidana Islam**, Grhadika Press, Jakarta.

Depdikbud, 1989, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Buku Satu, Balai  
Pustaka Utama, Jakarta.

Soedikno Mertokusumo, **Mengenal hukum (Suatu Pengantar)**,  
Liberty, Yogyakarta, 1991

Sonny Keraf, 1998, **Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya**, Kanisius,  
Yogyakarta.

## JURNAL

Donnelly, Jack, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*,  
Cornell University Press, London.

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004

### **Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang **Perlindungan Saksi dan Korban**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 23 Tahun 2003  
**Tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada tingkat  
resor dan Kepolisian sektor**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 **Tentang  
Kepolisian Republik Indonesia**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: 10 Tahun  
2007 **Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Perempuan  
dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Republik  
Indonesia**

## INTERNET

<https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> di akses pada 21  
maret 2018

